

SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI I / MEI 2025

KHUSUS

May Day 2025

Buruh Sampaikan Enam Tuntutan

13

NUSANTARA

Alarm untuk Keamanan

Produk Halal

22



OTONOMI DAERAH: JANJI YANG BELUM TUNTAS



Akses MAJALAH SENATOR Versi Digital

VARIA SENAT

Kolaborasi DPD RI dan Ombudsman Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

41

WARISAN DAERAH

Tari Saman: Warisan Gerak dari Tanah Gayo

52



Otonomi Daerah yang Kehilangan Ruhnya

Sudah 29 tahun berlalu sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sebagai hasil reformasi politik nasional, namun semangat desentralisasi kekuasaan yang menjadi ruhnya, justru mulai terkikis. Otonomi daerah yang semestinya menjadi sarana percepatan pembangunan dan pelayanan publik berbasis kearifan lokal, kini menghadapi tantangan serius. Pemerintah pusat, melalui berbagai regulasi sektoral seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Kehutanan, secara perlahan menarik kembali kewenangan yang sebelumnya telah diberikan kepada daerah. Hal ini menjadi ironi dalam sistem pemerintahan yang mengusung semangat demokrasi dan keadilan sosial.

Indikasi kuat terjadinya resentralisasi juga diakui oleh para senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa otonomi daerah saat ini telah kehilangan "roh"-nya akibat distorsi regulasi sektoral yang tidak selaras dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, senator Agustin Teras Narang secara tegas menyebut bahwa realitas yang dihadapi daerah saat ini menunjukkan kemunduran dalam pelaksanaan desentralisasi. Ia menilai bahwa kebijakan pusat yang mengurangi kewenangan daerah justru menghambat efektivitas pelayanan publik dan memperlemah daya saing daerah.

Kritik ini bukan sekadar retorika politik, melainkan respons terhadap fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih tinggi, kapasitas fiskal daerah sangat bergantung pada transfer pusat, dan daerah kerap kesulitan menjalankan program tanpa campur tangan pusat. Resentralisasi terselubung juga berisiko menimbulkan demoralisasi di kalangan

kepala daerah yang merasa tangannya terikat oleh kebijakan pusat, padahal mereka dituntut untuk menciptakan inovasi dan percepatan pembangunan di daerah masing-masing.

Namun demikian, otonomi daerah tidak sepenuhnya gagal. Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhandi, menyebut bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syaratnya, regulasi-regulasi dari pusat harus selaras dan tidak tumpang tindih, serta tetap menghormati semangat desentralisasi. Dalam konteks ini, pembahasan perubahan terhadap UU Pemerintahan Daerah yang sedang berlangsung harus menjadi momentum untuk memperbaiki arah dan pelaksanaan otonomi daerah agar tidak kehilangan substansi awalnya.

Solusi yang ditawarkan adalah sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta keberanian pemerintah pusat untuk ikhlas berbagi kewenangan demi kemajuan bersama. Pemerintah pusat tidak boleh memandang daerah hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun Indonesia dari pinggiran, sesuai cita-cita nawacita dan UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai bangsa yang majemuk dengan kondisi geografis yang luas dan beragam, Indonesia tidak bisa dibangun dengan pendekatan sentralistik. Otonomi daerah harus ditempatkan kembali di jalur yang benar, bukan semata-mata untuk membagi kekuasaan, melainkan sebagai sarana keadilan pembangunan dan penguatan NKRI. Bila semangat desentralisasi ini tidak dikembalikan, maka mimpi tentang Indonesia Emas 2045 akan terhambat oleh realitas daerah yang tak diberdayakan secara optimal. (* /Theresia Oktavina)

SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma
PEMIMPIN REDAKSI: Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

Broken-Spirited Regional Autonomy

It has been 29 years since regional autonomy policy is implemented as a result of national political reformation, yet the supposedly spirit of authority decentralization begins to be eroded. Regional autonomy which is supposed to be the infrastructure for accelerating development and local-wisdom based public service is now facing serious challenge. The central government, through various sectoral regulations such as Law of Job Creation, Law of Mineral and Coal Mining, and Law of Forestry, gradually revokes the authorities which were initially given to the regions. This becomes an irony in a government administration which promotes democracy and social justice.

Strong indication of re-centralization is also acknowledged by senators of the House of Regional Representatives (DPD) RI. Chairman of Committee I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, affirms that the current regional autonomy has lost its spirit due to distorted sectoral regulations which are no longer in alignment with the objectives of Regional Administration Law. Meanwhile, senator Agustin Teras Narang affirmatively states that the reality presently faced by the regions indicates a decline in decentralization implementation. He assesses that the central government's policy which reduces regions' authorities has indeed obstructed the effectiveness of public services and weakened regional competitiveness.

The criticism is not merely political rhetoric, on the contrary it's a respond toward evidence on the field which indicate highly unequal inter-regional development, high dependency on central administration's transfer for regional fiscal capacity, regions' difficulty to implement the program independent from the central government. Vague re-centralization also bears the risk of demoralization among

regions' heads who perceive their hands are bound by central policies, despite being charged to create innovation and regional development in each respective region.

Nevertheless, regional autonomy program does not fully collapse. Vice Chairman of Committee I DPD RI, Muhdi, calls the implementation of regional autonomy still has big potential to improve prosperity in the community, provided that the central regulations are in harmony, not overlapping, and still upholding decentralization spirit. In the context, the on-going discussion to amend Regional Administration Law should become a momentum to fix the direction and implementation of regional autonomy in order not to lose the original substance.

The offered solution is to synchronize central and regional regulations, empower institutional capacity of regional administrations, encourage central government to sincerely share authorities for corporate advancement. Central Government may not deem regional administrations as merely technical executors, but rather as strategic partners in developing Indonesia from the peripheral in accordance with the objectives of Nawacita and UUD NRI 1945.

As a pluralistic nation with vast and diverse geographical condition, Indonesia cannot be built under centralization approach. Regional autonomy should revert to the right path: not merely as means of power-sharing, but rather as a just development infrastructure and solidification of NKRI. If the spirit of decentralization does not revert, the dream about Golden Indonesia 2045 will be hampered by regional reality which is not utilized optimally. (/Theresia Oktavina)*

SENATOR
MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ADVISOR BOARD: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **NEWS IN CHARGE:** Mahyu Darma **EDITOR-IN-CHIEF:** Heru Firdan; **MANAGING EDITOR:** Budi Fitra Helmi; **PHOTO & GRAPHICS EDITOR:** Agus Wiharto; **SENIOR EDITORS:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **GRAPHIC DESIGNER & PHOTOGRAPHER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **ARTICLE WRITER:** Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sadiyah.

EDITORIAL OFFICE News and Media Division, 1st Floor, Building B, DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6, Central Jakarta 10270.
Email: keranjangsenator@gmail.com Suggestions Box: majalah_senator@dpd.go.id // website: www.dpd.go.id // IG: @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

OTONOMI DAERAH: JANJI YANG BELUM TUNTAS

Dua puluh sembilan tahun sudah otonomi daerah bergulir, namun harapan besar di balik kebijakan ini tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Setiap 25 April, bangsa ini memperingati Hari Otonomi Daerah—sebuah refleksi atas semangat desentralisasi yang lahir pasca-reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya mulia: memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, demi pemerataan pembangunan dan penguatan demokrasi lokal.

Mas Aryo Kritiyanto

Penulis

Namun, dalam perjalanannya, otonomi daerah menghadapi jalan terjal. Ketimpangan kapasitas antar daerah, tumpang tindih kewenangan, hingga praktik korupsi lokal masih menjadi penghambat utama. Harapan bahwa daerah bisa menggali potensi lokal, memperbaiki layanan publik, dan mempercepat pembangunan, nyatanya belum sepenuhnya terwujud. Bahkan, dalam beberapa kasus, otonomi yang seharusnya memperkuat daerah justru kehilangan arah karena tergusur oleh regulasi yang sentralistik.

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, otonomi daerah kini kian kehilangan “roh”-nya karena semakin terbatasnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah

keberadaan UU Cipta Kerja yang menarik sejumlah kewenangan perizinan ke pusat, padahal urusan tersebut sebelumnya menjadi domain utama pemerintah daerah.

Kritik juga datang dari pakar otonomi daerah, Johermansyah Johan. Guru besar IPDN ini menyebut pelaksanaan otonomi daerah selama 25 tahun terakhir justru mengalami kemunduran. “Terjadi resentralisasi dan deotonomisasi secara perlahan. Pemerintah pusat seolah enggan berbagi kewenangan dengan daerah,” ujarnya. Kewenangan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, kelautan, hingga perumahan, kembali ditarik ke pusat, membuat daerah seperti kehilangan instrumen penting untuk membangun dirinya sendiri.

Padahal, menurut Johermansyah, roh dari otonomi daerah terletak pada kewenangan. Tanpa itu, daerah tak ubahnya perpanjangan



Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tangan pusat yang terbatas gerakannya. “Daerah tidak dapat mengurus kepentingan masyarakat dengan baik, apalagi mempercepat pembangunan. Ini kontraproduktif dengan semangat reformasi yang menjadi landasan lahirnya otonomi daerah,” tegasnya. Ia menilai perlu ada kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan esensi otonomi daerah.

Peringatan Hari Otonomi Daerah seharusnya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengevaluasi dan mengoreksi arah kebijakan desentralisasi. Jika tidak ada pembenahan mendasar, maka janji otonomi hanya akan menjadi narasi indah yang tak pernah benar-benar membumi di daerah. Otonomi bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan benar-benar dimulai dari bawah. (*)

Otda Cenderung Sentralistik, Teras Narang: Ini Harus Diluruskan!

Adhi Nugroho

Penulis

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 menjadi panggung refleksi yang menggugah, terutama ketika kritik tajam datang dari senator senior DPD RI, Agustin Teras Narang. Dalam wawancaranya dengan Radio Elshinta, Minggu (27/4/2025), mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi otonomi daerah yang menurutnya sedang mengalami kemunduran. “Tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya tegas, merujuk pada berbagai kebijakan yang justru menunjukkan gejala resentralisasi.

Padahal, jika merujuk pada semangat konstitusi, hubungan pusat dan daerah seharusnya bersifat setara dalam pembagian kekuasaan dan kewenangan. Otonomi daerah, menurut Teras, adalah bagian dari penataan pemerintahan berjenjang demi kemajuan daerah dan bangsa. Namun kini, beberapa undang-undang baru justru memangkas kewenangan daerah secara signifikan, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Kehutanan. “Ini kontraproduktif dengan semangat keadilan dan kesejahteraan,” ungkapnya.

Teras Narang menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Bukan hanya sekadar hubungan administratif, tetapi semangat kolaboratif yang saling menguatkan. Ia menyayangkan bahwa ketika kelemahan ditemukan di daerah, respons pusat justru berupa penarikan kewenangan, alih-alih pembinaan dan penguatan. Hal ini, katanya, menimbulkan ketimpangan serta ketidakpastian bagi pelaku investasi yang membutuhkan harmonisasi dan kepastian hukum di tingkat nasional dan lokal.

Sebagai senator dari Kalimantan Tengah yang tidak terikat partai politik, Teras me-



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ngaku memiliki kebebasan untuk bersuara lantang demi memperjuangkan daerah. Ia menegaskan bahwa DPD RI akan terus mendorong agar pelaksanaan otonomi daerah kembali ke jalurnya. “Daerah yang kuat adalah syarat utama negara yang kuat,” katanya. Menurutnya, visi Indonesia Emas hanya akan menjadi angan-angan jika daerah tidak diberi peran optimal.

Teras juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Tanpa pelibatan yang proporsional, berbagai program nasional akan kehilangan daya jangkau. Ia menilai bahwa pembangunan tidak akan inklusif tanpa kebijakan yang benar-benar berpihak pada pemberdayaan daerah.

Dengan nada yang reflektif namun penuh semangat, Teras Narang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Hari Otonomi Daerah sebagai momentum koreksi bersama. “Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. Sebuah seruan moral yang menggugah, di tengah arus balik yang terus menekan ruang otonomi yang seharusnya menjadi milik daerah. (*)

Desentralisasi Butuh Regulasi Selaras

M. Fathoni

Penulis

Implementasi otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi juga komitmen mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, dalam diskusi publik bertajuk “Hubungan Pusat dan Daerah: Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah” yang digelar di Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025). “Dengan otonomi daerah, pertumbuhan di daerah bisa berjalan lebih cepat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Muhdi menyoroti pentingnya regulasi yang menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurutnya, kebijakan antara pusat dan daerah harus berjalan seiring, bukan saling bertentangan. Jika regulasi tidak harmonis, maka pelaksanaan otonomi daerah justru berpotensi menghadirkan konflik administratif, tumpang tindih kewenangan, dan bahkan stagnasi pembangunan. “Regulasi yang dibuat harus sejalan dengan semangat dan amanat UUD NRI Tahun 1945,” tegas senator asal Jawa Tengah ini.

Saat ini, DPD RI turut terlibat



Anggota DPD RI Muhdi (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dalam pembahasan perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Muhdi, proses ini harus terbuka terhadap masukan dari seluruh komponen masyarakat, agar substansinya benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi daerah. “Kami ingin menyerap aspirasi agar aturan-aturan ke depan bisa menyelaraskan antara peraturan satu dengan yang lain,” jelasnya.

Dalam pandangan Muhdi, distorsi terhadap semangat desentralisasi kerap muncul akibat adanya regulasi yang tidak sinkron. Oleh karena itu, momen revisi UU Pemda harus dijadikan peluang memperbaiki segala kekeliruan masa lalu. Jika distorsi tidak segera diluruskan, cita-cita desentralisasi akan sulit diwujudkan dan hanya akan menjadi jargon kosong di tengah masyarakat daerah yang membutuhkan keadilan pembangunan.

Diskusi publik ini juga menghadirkan suara akademisi. Dekan FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, menekankan bahwa harmonisasi antara pusat dan daerah harus menjadi prinsip utama. Menurutnya, implementasi desentralisasi akan gagal jika program-program pemerintah pusat tidak mendapatkan dukungan nyata dari daerah, dan sebaliknya. “Pemerintah pusat harus memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program di daerah,” katanya.

Pesan yang mengemuka dari diskusi ini jelas desentralisasi bukan sekadar agenda politik atau teknokrasi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Namun agar cita-cita itu terwujud, dibutuhkan regulasi yang adil, dialog yang terbuka, dan kemauan bersama untuk menyatukan langkah demi kemajuan daerah dan bangsa. (*)

Reduksi Otonomi Daerah di Bawah Bayang UU 23/2014

Arso P Nugroho

Penulis

Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lahir pada masa Presiden BJ Habibie, banyak pihak menyambutnya sebagai tonggak penting reformasi birokrasi dan desentralisasi kekuasaan. Daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mengelola sumber daya, serta menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Namun, seiring waktu, semangat otonomi tersebut perlahan mengalami penyusutan. Puncaknya terjadi ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan, menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang lahir pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

UU 23/2014 yang disahkan di penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sebagai titik balik penguatan kembali sentralisasi kewenangan. Banyak urusan strategis seperti pengelolaan pendidikan menengah, kehutanan, dan energi dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi atau bahkan langsung ke pemerintah pusat. Akibatnya, ruang gerak daerah dalam mengelola urusan domestik mereka menjadi kian sempit. Hal inilah yang

menjadi sorotan tajam anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman atau yang lebih dikenal dengan sapaan Haji Uma.

Dalam berbagai kesempatan, Haji Uma menegaskan bahwa UU 23/2014 telah mereduksi otonomi daerah secara signifikan. "Dulu, pemerintah daerah punya keleluasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Tapi kini, banyak kewenangan strategis justru ditarik ke pusat," ujarnya. Baginya, penarikan kewenangan tersebut tidak hanya memperlambat pembangunan, tetapi juga menjauhkan pemerintah dari rakyat yang seharusnya mereka layani.

Haji Uma menyoroti bahwa kebijakan yang disusun di Jakarta belum tentu relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan berbeda. Ketika ke-

wenangan dihilangkan, maka fleksibilitas daerah dalam mengelola investasi, pelayanan publik, dan sumber daya menjadi terbatas. Akibatnya, potensi lokal yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan terancam tidak maksimal.

Sebagai Anggota Komite I DPD RI yang membidangi otonomi daerah, Haji Uma menegaskan komitmennya untuk terus mengawal evaluasi terhadap UU 23/2014. Menurutnya, DPD RI sebagai representasi daerah memiliki mandat konstitusional untuk memastikan agar desentralisasi tidak hanya menjadi jargon, tapi betul-betul dijalankan dalam praktik pemerintahan. Ia percaya bahwa keseimbangan antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan yang berkeadilan.

"Kami akan terus mendorong revisi dan penyesuaian terhadap undang-undang ini, agar prinsip otonomi daerah tidak dikorbankan oleh semangat sentralisasi," tegasnya. Dalam pandangan Haji Uma, masa depan Indonesia tidak bisa lepas dari peran aktif pemerintah daerah. Maka, sudah saatnya kebijakan nasional lebih mendengarkan suara daerah, agar pembangunan benar-benar berakar pada kebutuhan rakyat di seluruh pelosok negeri. (*)



Anggota DPD RI Sudirman
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Langkah Strategis Menghadapi Tantangan Otonomi Daerah

Betria Eriani

Penulis

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan antarwilayah, ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, serta rendahnya tingkat inovasi daerah menjadi hambatan utama. Fahira Idris, anggota DPD RI, mengungkapkan lima langkah strategis yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini dan mewujudkan otonomi daerah yang efektif.

Langkah pertama adalah memperkuat implementasi otonomi asimetris, yaitu dengan mengakui karakteristik unik setiap daerah, seperti aspek geografis, kapasitas fiskal, dan sosial budaya.

Regulasi yang ada harus diperbarui agar hubungan antara kewenangan, keuangan, dan pengawasan daerah lebih adaptif terhadap kondisi lokal, tanpa menyamaratakan kebijakan untuk semua daerah.

“Otonomi daerah adalah alat, bukan tujuan akhir.”

Anggota DPD RI,
Fahira Idris

Kemandirian fiskal menjadi langkah kedua yang penting. Daerah perlu menggali potensi ekonomi lokal melalui reformasi perpajakan dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah pusat diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali, sementara penguatan kelembagaan pajak dan SDM daerah akan mengurangi ketergantungan fiskal pada pusat.

Langkah ketiga adalah reformasi birokrasi daerah dan tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang profesional, responsif, dan akuntabel diperlukan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan

transparan. Reformasi birokrasi harus memperhatikan efisiensi serta nilai-nilai pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Keempat, pemilu lokal yang demokratis dan akuntabel harus diwujudkan. Sistem pencalonan yang lebih terbuka, pengurangan biaya politik, serta penguatan peran DPRD dalam pemerintahan daerah sangat penting untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan visioner.

Terakhir, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam semangat *collaborative governance*. Otonomi daerah bukan berarti terlepas dari koordinasi pusat dengan daerah. Sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah harus menjadi panduan dalam membentuk tata kelola yang selaras untuk kepentingan nasional dan lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, Fahira optimistis otonomi daerah bisa menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat. “Otonomi daerah adalah alat, bukan tujuan akhir,” ujarnya, menegaskan pentingnya sinergi dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. (*)



Anggota DPD RI Fahira Idris
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Desentralisasi Bukan Sekadar Menjadi Konsep Administratif

Nanda Russia Rola

Penulis

Desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya sekadar konsep administratif, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lamek Dowansiba, dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (Asmas) yang dilaksanakan di Kampung Bremsi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada Jumat (25/4/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam dialog dengan masyarakat, berbagai isu penting diangkat, mulai dari terbatasnya akses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, hingga pembahasan keberlanjutan Otonomi Khusus Jilid II. Lamek menekankan bahwa desentralisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai tugas administratif semata, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama di daerah seperti Papua Barat yang membutuhkan perhatian khusus. "Aspirasi dari kampung-kampung seperti Bremsi ini menjadi dasar bagi kami di DPD RI untuk diperjuangkan," ujar Lamek.

Kegiatan penyerapan aspirasi serupa juga diadakan oleh Senator Frits Tobo Wakasu, yang mewakili daerah pemilihan Papua Selatan, pada Senin (21/4/2025) di Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Merauke. Frits menjelaskan kepada masyarakat tentang makna penting dari tiga konsep dasar dalam otonomi daerah, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Sentralisasi mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sementara desentralisasi adalah kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah



Anggota DPD RI Frits Tobo Wakasu (Foto Istimewa)



Anggota DPD RI Lamek Dowansiba (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

daerah untuk dikelola lebih luas.

Frits juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman bahwa di Papua, ada aspek kekhususan daerah yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, otonomi daerah di Papua Selatan memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan desentralisasi yang berjalan di wilayah Papua Selatan, meskipun ada otonomi daerah, tugas-tugas pemerintah pusat dan pengawasan tetap hadir di sana.

Masyarakat di Papua Selatan dan Papua Barat menyampaikan berbagai kebutuhan lokal yang harus diprioritaskan, baik dalam pembangunan fisik maupun pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah, koordinasi dengan pusat tetap diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan penyerapan aspirasi ini, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta memperkuat implementasi desentralisasi yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. "Desentralisasi harus memberi dampak positif, dan kami di DPD RI akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar otonomi daerah benar-benar memberikan kesejahteraan," tutup Lamek. (*)

Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Sinergi Pusat dan Daerah

Helena AF Ojan

Penulis

Pelaksanaan otonomi daerah yang optimal memerlukan sinergi konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jelita Donal, yang mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi otonomi sangat bergantung pada keterbukaan komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kebijakan. Menurutnya, otonomi daerah bukan hanya sekadar soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk membangun wilayah masing-masing.

Jelita Donal, senator dari Sumatera Barat, menyatakan bahwa kepala daerah harus memanfaatkan jaringan strategis yang ada, termasuk peran senator di DPD RI, guna mempercepat pembangunan daerah. Dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat di Padang, Selasa (22/4/2025), ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan yang dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga dan komunitas rukun tetangga (RT) serta rukun warga (RW). “Indonesia tidak bisa dibangun dari pusat saja, harus ada kesadaran kolektif bahwa pembangunan yang berkelanjutan dimulai dari akar rumput,” ungkapnya.

Partisipasi warga dalam tingkat terkecil memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan

aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.

Kegiatan serap aspirasi ini juga dihadiri oleh anggota DPD RI dari Sumatera Selatan, Eva Susanti, yang mengadakan pertemuan serupa di Kabupaten Banyuasin pada Kamis (24/4/2025). Eva menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Ia mengingatkan bahwa desentralisasi bukan hanya tentang pelimpahan kewenangan, tetapi juga tentang bagaimana daerah memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan demi kesejahteraan rakyat.

Eva juga menambahkan bahwa desentralisasi merupakan bagian dari komitmen terhadap demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Dengan pengelolaan yang baik di tingkat daerah, maka kesejahteraan rakyat akan tercapai lebih merata. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan baik untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang jauh dari pusat.

Dengan sinergi antara pusat dan daerah, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Eva Susanti. (*)



Anggota DPD RI Eva Susanti
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Jelita Donal
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Otonomi Daerah Jembatan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Lela Sadiyah

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Penrad Siagian, menegaskan bahwa otonomi daerah seharusnya tidak dipandang sebagai sekat pemisah antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan sebagai jembatan yang memperkuat kolaborasi di antara keduanya. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Selasa (22/4/2025), Penrad menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkeadilan. “Ini adalah kunci dalam mewujudkan tujuan besar kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Penrad, yang berharap Indonesia dapat mencapai kemajuan, kemakmuran, dan martabat yang lebih tinggi pada tahun 2045.

Penrad juga menyoroti tema besar peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan semangat Hari Otonomi Daerah ini, ia berharap agar semakin banyak sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat mempercepat pencapaian Indonesia yang lebih maju. Menurutnya, kerjasama antara pusat dan daerah harus dijalin dengan harmonis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memberikan apresiasi atas kunjungan Penrad dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk menjaring aspirasi daerah serta mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di wilayah Taput. Bupati Hutabarat mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya, termasuk masalah pembagian kewenangan yang belum sepenuhnya jelas dan koordinasi yang kurang efektif antar pemerintahan, khususnya



Anggota DPD RI Penrad Siagian bersama Bupati Tapanuli Utara Taripar Parsaoran Hutabarat. (Foto Istimewa)

dalam hal perizinan kawasan hutan, pengangkatan tenaga honorer, dan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bupati Hutabarat berharap bahwa masukan dan aspirasi dari Taput akan dipertimbangkan dalam penyusunan laporan dan rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa sinergi antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap, dengan adanya kolaborasi yang lebih kuat, Taput bisa berkembang lebih baik lagi,” katanya.

Penrad Siagian mengakui tantangan yang dihadapi daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, ia juga menegaskan bahwa dengan kerja sama yang solid, hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi. “Melalui sinergi yang erat, kita bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat dapat lebih relevan dan berdampak positif langsung bagi masyarakat di daerah,” ujar Penrad.

Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan baik dapat mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bukan hanya diperlukan, tetapi menjadi suatu keharusan. “Sinergi ini akan mempercepat mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana seluruh daerah dapat berkembang secara merata dan adil,” pungkas Penrad. (*)

Daerah Berperan Mewujudkan Visi Besar Indonesia Emas 2045

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Siti Aseanti, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Otonomi Daerah, yang diperingati setiap 25 April, sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi, pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. “Otonomi daerah adalah jalan untuk mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada rakyat. Ini adalah amanah reformasi yang harus terus kita rawat agar demokrasi lokal semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia semakin meningkat,” ujar senator dari Kalimantan Tengah tersebut pada Jumat (25/4/2025).

Siti Aseanti menegaskan bahwa sesuai dengan tema Hari Otonomi Daerah 2025, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Penguatan kapasitas pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi pelayanan publik harus menjadi prioritas ke depan. “Pemerintah daerah harus menjadi motor perubahan. Bukan hanya melayani administrasi, tapi juga harus aktif menciptakan peluang ekonomi, membangun sumber daya manusia unggul, dan mendukung keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Senator asal Kalimantan Tengah ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan daerah untuk menciptakan peluang ekonomi yang inklusif. Ia berharap agar setiap daerah, termasuk Kalimantan Tengah, dapat memperkuat

daya saingnya dengan mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki secara berkelanjutan. “Kita ingin Kalimantan Tengah semakin maju tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan semangat otonomi daerah, mari kita bersama-sama membangun daerah kita untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” ujarnya.

Sebagai wakil daerah di tingkat pusat, Siti Aseanti berharap agar Kalimantan Tengah terus memperkokoh identitasnya sebagai provinsi yang berbasis pada pengelolaan sumber daya

alam secara berkelanjutan. Menurutnya, peran daerah sangat penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. “Kami ingin memastikan bahwa setiap daerah, termasuk Kalimantan Tengah, tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan

lokal yang telah ada,” tambahnya.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas, otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Siti Aseanti menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan bahwa tujuan besar Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dengan melibatkan semua pihak, baik di pusat maupun di daerah.

Ia mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk semakin aktif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pada potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. “Dengan kerja sama yang solid, kita akan mencapai Indonesia Emas 2045 yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” tutupnya. (*)



MAY DAY 2025

Buruh Sampaikan Enam Tuntutan

Theresia Oktavina

Penulis

Peringatan Hari Buruh Internasional atau *May Day* 2025 yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Massa yang hadir diklaim lebih dari 200.000 buruh dan pekerja dari berbagai daerah. Acara berlangsung aman, meriah, dan penuh semangat kebersamaan.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional itu mencatatkan sejarah baru karena baru pertama kali dihadiri langsung oleh seorang presiden. Kehadiran Presiden Prabowo mendapat sambutan hangat dari massa buruh dan dinilai mencerminkan komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh Indonesia.

“Perayaan Hari Buruh tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh Kepala Negara. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan dan kesejahteraan buruh Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia, Shoya Yoshida, dalam sambutannya.

Sehari sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal,



Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). (Foto Setpres)

“**Perayaan Hari Buruh tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh Kepala Negara. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan dan kesejahteraan buruh Indonesia.**”

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia, Shoya Yoshida

kepada pers menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional 2025 membawa enam tuntutan utama, yaitu penghapusan sistem *outsourcing*, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, realisasi upah layak,

pengesahan RUU Perampasan Aset, dan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

Presiden Prabowo dalam sambutannya berjanji menindaklanjuti enam tuntutan utama yang disampaikan serikat pekerja tersebut dengan serius, dengan melibatkan kementerian terkait untuk melakukan kajian mendalam. Ia juga akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.

“Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini bertugas mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden, mana undang-undang yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh, mana regulasi yang enggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” kata Prabowo. (*)

DPD RI Siap Menjadi Wadah Aspirasi Buruh



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Betria Eriani

Penulis

Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau *May Day*. Namun, beberapa hari sebelum perayaan *May Day* 2025, tepatnya hari Senin (28/4/2025), beberapa gabungan organisasi buruh mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kehadiran para buruh tersebut adalah bagian dari upaya memperjuangkan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak kepada mereka.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menerima perwakilan dari organisasi buruh tersebut. “Para pekerja adalah motor penggerak pembangunan, khu-

susnya di daerah-daerah berbasis industri. DPD RI siap menjadi wadah bagi aspirasi buruh dalam memperjuangkan kebijakan yang inklusif,” kata Tamsil.

Tamsil menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menjadi titik balik untuk mengarahkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan manusiawi. Dia mengajak serikat buruh untuk aktif memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang harus disusun terpisah dari UU Cipta Kerja dalam kurun waktu dua tahun.

Pada kesempatan itu, Tamsil juga menyampai-

kan keprihatinan terhadap dampak perang dagang global yang memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ekspor, seperti tekstil, garmen, dan kelapa sawit. Ia memandang tantangan ini sebagai peluang untuk memperkuat industri dalam negeri, dengan menjadikan buruh sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

“Kondisi pekerja saat ini sangat rentan menjadi korban ketidakpastian global. Namun, kita mencoba merespons dinamika yang terjadi secara produktif dan konstruktif. Ini juga membuka peluang bagi kemandirian bangsa kita,” tegas senator asal Sulawesi Selatan itu.

Tamsil mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan pekerja. Ia menilai program Asta Cita mencerminkan keberpihakan kepada buruh, terutama melalui pelatihan vokasi nasional dan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, yang turut meringankan beban ekonomi keluarga pekerja. “Keberpihakan Presiden kepada buruh adalah lentera harapan dalam perjuangan panjang kita,” kata Tamsil. (*)

Suara Buruh Harus Diakomodir Dalam Pengambilan Keputusan

Helena AF Ojan

Penulis

Saat ini, gerakan buruh telah berkembang menjadi kekuatan moral yang memperjuangkan isu-isu lintas sektoral, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan agar buruh atau pekerja di Indonesia benar-benar menjadi pelaku aktif pembangunan.

“Tugas kita sebagai bangsa adalah memastikan bahwa buruh tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tetapi juga pelaku aktif dalam merumuskan arah masa depan negeri ini. Artinya, suara buruh harus diakomodasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Karena ketika buruh sejahtera, Indonesia kuat. Hal ini harus menjadi refleksi kita bersama di May Day tahun ini,” tegas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, Kamis (1/5/2025).

Senator dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ini menyampaikan empat catatan yang bisa menjadi rekomendasi strategis untuk mengupayakan kesejahteraan buruh agar bisa berperan lebih optimal dalam pembangunan nasional. Pertama, penguatan sistem pengupahan yang adil



Ilustrasi Demo buruh (Ist)

dan adaptif. Pemerintah perlu memperkuat sistem penetapan upah berbasis negosiasi tripartit yang mengedepankan dialog sosial antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Kedua, penguatan serikat buruh dan organisasi pekerja. Serikat buruh merupakan pilar utama dalam perlindungan hak-hak pekerja. Namun, banyak serikat masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memberi dukungan berupa pelatihan advokasi, bantuan hukum, akses informasi kebijakan, serta perlindungan terhadap hak untuk berserikat.

Ketiga, perluasan cakupan jaminan sosial dan perlindungan kerja inklusif. Saat ini, masih terdapat buruh sektor informal, pekerja lepas (gig economy), dan buruh migran yang belum terlindungi sistem jaminan sosial. Negara perlu

memperluas cakupan BPJS bagi buruh berpenghasilan rendah serta menegakkan aturan keselamatan kerja, khususnya di sektor rawan dan bagi pekerja perempuan yang rentan diskriminasi.

Keempat, pendidikan dan mobilitas sosial untuk generasi pekerja. Investasi pada pendidikan adalah jalan jangka panjang menuju kesejahteraan buruh. Akses beasiswa pendidikan bagi anak buruh perlu diperluas hingga perguruan tinggi untuk mendorong mobilitas sosial dan keluar dari kemiskinan struktural.

“Kesejahteraan buruh bukan hanya soal upah, tetapi juga perlindungan kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga pengakuan atas hak-hak serikat. Jika hal ini sudah dicapai, maka kemajuan Indonesia akan semakin dekat,” pungkas Fahira Idris. (*)

Perkuat Komitmen Negara Jamin Perlindungan Pekerja

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau *May Day* yang jatuh pada 1 Mei 2025, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, menyampaikan keprihatinan sekaligus seruan penting kepada seluruh pemangku kepentingan terkait komitmen negara dalam menjamin perlindungan dan keadilan sosial bagi para pekerja Indonesia.

“May Day bukan hanya seremoni tahunan atau sekadar simbol perjuangan buruh. Ini adalah momen reflektif yang seharusnya menggugah semua pihak untuk memastikan bahwa para pekerja Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil dan bermartabat,” ujar Filep, Kamis (30/4/2025).

Ia menyoroti tantangan yang semakin kompleks di tengah dunia kerja yang berubah cepat akibat globalisasi, digitalisasi, dan deregulasi ketenagakerjaan. Banyak pekerja kini berada dalam posisi rentan karena sistem kerja kontrak, outsourcing, serta lemahnya posisi tawar serikat buruh akibat fragmentasi sektor kerja.

“Kita tidak boleh membiarkan hak-hak pekerja dikorbankan demi investasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Pekerja bukan beban, melain-



Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“*May Day* bukan hanya seremoni tahunan atau sekadar simbol perjuangan buruh. Ini adalah momen reflektif yang seharusnya menggugah semua pihak untuk memastikan bahwa para pekerja Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil dan bermartabat.”

Ketua Komite III
DPD RI,
Filep Wamafma

kan tulang punggung pembangunan. Negara harus hadir, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pemelihara kesejahteraan rakyat, terutama kaum pekerja,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Filep, saat ini Komite III DPD RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai bentuk komitmen dalam menjamin perlindungan dan keadilan sosial bagi para pekerja Indonesia.

Filep juga mendorong pemerintah untuk segera mempercepat ratifikasi Konvensi ILO Nomor 102 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial dan menyempurnakan sistem jaminan sosial nasional agar mencakup semua pekerja, termasuk sektor informal, pekerja migran, pekerja *platform* digital, dan pekerja lepas. Selain itu, ia meminta adanya pengawasan ketat terhadap implementasi upah layak, jam kerja manusiawi, serta jaminan perlindungan ketenagakerjaan berbasis keadilan. (*)

Mari Maknai Hari Buruh dengan Bertindak Nyata

Arso P Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Siti Aseanti, menekankan pentingnya keberpihakan negara dalam memperjuangkan hak dan martabat buruh atau pekerja di seluruh Indonesia. Pekerja merupakan fondasi keberlangsungan sistem sosial dan ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh atau **May Day** bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pengingat kolektif bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat perlindungan hukum, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan bagi seluruh buruh. “Mari kita maknai Hari Buruh sebagai panggilan untuk bertindak nyata. Bukan hanya soal upah layak, tapi juga soal martabat manusia, keadilan sosial, dan masa depan generasi pekerja Indonesia,” ujarnya, dikutip dari Kalteng.co, Kamis (1/5/2025).

Siti Aseanti menyebut perjuangan buruh sebagai bagian dari sejarah panjang bangsa ini, yang tidak boleh lengah meng-

“**Mari kita maknai Hari Buruh sebagai panggilan untuk bertindak nyata. Bukan hanya soal upah layak, tapi juga soal martabat manusia, keadilan sosial, dan masa depan generasi pekerja Indonesia.**”

Anggota DPD RI,
Siti Aseanti

hadapi tantangan baru, terutama dalam konteks ketenagakerjaan yang kini semakin kompleks akibat digitalisasi, otomatisasi, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Senator yang berlatar belakang profesional di bidang kesehatan ini menyoroti masih banyaknya tenaga kerja, terutama kaum perempuan dan pekerja informal, yang belum terlindungi secara optimal. Karena itu, ia mendorong agar revisi kebijakan ketenagakerjaan dan pengawasan implementasinya menjadi agenda prioritas nasional.

“Kita harus

menghadirkan sistem ketenagakerjaan yang tidak diskriminatif, ramah terhadap perempuan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ini membutuhkan regulasi yang tegas dan pengawasan yang konsisten dari pusat hingga daerah,” tegasnya.

Dia juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi berbasis lokal, serta memperkuat kemitraan antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah daerah. Menurutnya, meningkatkan kompetensi pekerja adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan

daya saing daerah.
(*)



Anggota DPD RI Siti Aseanti
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Buruh di Daerah Suarakan Peningkatan Kesejahteraan

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Di tengah tantangan global dan transformasi digital yang cepat, nasib buruh Indonesia masih membutuhkan perhatian serius. Banyak dari mereka yang bekerja dengan upah minimum yang belum sebanding dengan kebutuhan hidup layak, tanpa jaminan kerja yang memadai, dan bahkan minim perlindungan sosial.

“Di Lampung sendiri, aspirasi buruh terus mengalir kepada kami, menyuarakan harapan atas peningkatan kesejahteraan, jaminan kepastian kerja, serta keterlibatan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hidup mereka,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Lampung, Abdul Hakim, Kamis (1/5/2025).

Hari Buruh Internasional atau **May Day**, yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah panggilan moral bagi semua, terutama pemangku kebijakan, untuk kembali meninjau sejauh mana keadilan sosial dan kesejahteraan telah diberikan kepada para pekerja, sebagai tulang punggung bangsa ini.

Sebagai wakil rakyat dari daerah, Hakim percaya bahwa memperjuangkan hak-hak buruh adalah bagi-



Anggota DPD RI Abdul Hakim (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Di Lampung sendiri, aspirasi buruh terus mengalir kepada kami, menyuarakan harapan atas peningkatan kesejahteraan, jaminan kepastian kerja, serta keterlibatan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hidup mereka.”

Anggota DPD RI,
Abdul Hakim

an dari ibadah dan amanah konstitusional. Islam mengajarkan pentingnya menaikkan hak pekerja sebelum keringatnya mengering. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat UUD 1945 dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Momentum Hari Buruh ini harus dimaknai sebagai ajakan

untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan bermartabat. Pemerintah daerah dan pusat perlu bersinergi memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, memastikan implementasi upah minimum yang rasional, serta memperluas akses pelatihan dan pendidikan vokasi agar buruh kita mampu bersaing di era industri 4.0.

“Mari kita jadikan 1 Mei 2025 ini sebagai titik balik untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil bagi para pekerja. Karena buruh yang sejahtera bukan hanya simbol kemajuan ekonomi, melainkan fondasi kokoh bagi masa depan bangsa yang bermartabat. Buruh bersama keluarganya adalah entitas penting bangsa yang mesti dibela dan diperhatikan. Nasib mereka mesti ada perbaikan dari waktu ke waktu,” tegas Hakim. (*)

Buruh Berkontribusi Menjaga Stabilitas Sektor Strategis

Adhi Nugroho

Penulis

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau *May Day* 2025, Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pekerja di Indonesia yang telah menjadi garda terdepan dalam menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perbankan, keuangan, industri, dan perdagangan.

“Mereka bukan hanya tenaga penggerak ekonomi, tetapi juga simbol dedikasi dan semangat bangsa. Kontribusi mereka nyata dalam menjaga stabilitas sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, sektor keuangan, hingga perdagangan dalam negeri dan luar negeri,” ujar Senator Nawardi, Kamis (1/5/2025).

Nawardi menegaskan bahwa momentum Hari Buruh harus menjadi ajang refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif, untuk terus memperkuat regulasi yang berpihak kepada pekerja. Komite IV, dengan lingkup kerja di bidang perbankan, keuangan, investasi, industri, dan perdagangan, berkomitmen untuk terus mengawal



Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dan mendorong hadirnya legislasi yang menjamin hak, perlindungan, serta kesejahteraan buruh di seluruh daerah.

“Saya percaya bahwa kualitas legislasi di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan para pekerja. Oleh karena itu, DPD RI terus mengusulkan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang menjamin hak-hak pekerja, mendorong iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, serta memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Nawardi juga menilai pentingnya pelibatan daerah dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan ketenagakerjaan. Daerah memiliki karakteristik ekonomi

dan sosial yang berbeda, sehingga pendekatan terhadap perlindungan buruh harus disesuaikan secara kontekstual. Setiap kebijakan harus dapat memastikan bahwa kesejahteraan buruh tidak hanya dirasakan di pusat industri besar, tetapi juga di daerah-daerah.

Senator Nawardi mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, transformasi digital, serta perbaikan sistem pengupahan dan hubungan industrial yang berkeadilan. “Selamat Hari Buruh. Mari kita jadikan kesejahteraan buruh sebagai fondasi utama menuju ekonomi yang kuat dan berkeadilan,” tutupnya. (*)

Buruh Pilar Penting Bangsa Dalam Pembangunan Nasional

Rini Sumarni

Penulis

Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Eva Susanti, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi dan dedikasi para pekerja yang selama ini menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

“Selamat Hari Buruh untuk seluruh pekerja dan buruh di Tanah Air, khususnya di Sumatera Selatan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras, loyalitas, dan perjuangan yang telah diberikan demi kemajuan

bangsa,” ungkap Eva Susanti dalam pernyataan resminya, Kamis (1/5/2025).

Senator Eva menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh melalui jalur legislasi dan pengawasan kebijakan di tingkat pusat. Dia menyadari bahwa buruh adalah pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dan **pembangunan** nasional. Mereka bukan sekadar tenaga kerja, tetapi juga aset bangsa yang harus diperhatikan hak-haknya, kesejahteraannya, serta dilindungi martabat dan keselamatannya.

Sementara itu, Senator Hartono dari Papua Barat Daya menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan momentum untuk menghormati dedikasi dan kerja keras para buruh yang menjadi **pondasi** kemajuan bangsa. Buruh merupakan bagian vital dari roda pembangunan nasional.

“Peringatan Hari Buruh ini juga menjadi pengingat pentingnya perjuangan kaum pekerja

dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Ini saatnya kita menghormati semua dedikasi dan kerja keras mereka. Perjuangan mereka untuk keadilan dan kesejahteraan tidak boleh kita lupakan,” ujar Hartono, Kamis (1/5/2025).

Hartono juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda, khususnya Gen Z, agar turut memaknai Hari Buruh 2025 secara lebih aktif dan reflektif. Di tengah era disrupsi dan perubahan teknologi yang sangat cepat, anak muda harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal. “Bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini hanya bisa dimanfaatkan jika generasi muda mampu bergerak cepat dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” kata Hartono. (*)



Anggota DPD RI Eva Susanti
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Hartono
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kondisi Buruh Masih Sangat Buruk

Adhi Nugroho

Penulis

Tidak semua buruh mengikuti peringatan Hari Buruh Dunia atau **May Day 2025** bersama Presiden Prabowo Subianto di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Massa buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) memilih untuk menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI. Mereka merasa bahwa saat ini bukan waktunya untuk mengikuti acara *Mayday* Fiesta bersama presiden, mengingat kondisi buruh yang masih belum membaik.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menjelaskan bahwa pihaknya merasa situasi buruh Indonesia saat ini masih sangat buruk. Banyak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hidup dalam penderitaan akibat sistem ketenagakerjaan yang belum berpihak kepada mereka. “Buruh hidup dalam posisi penderitaan karena sistem ketenagakerjaan kita yang memang belum berpihak pada mereka,” ungkap Sunarno kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Kamis (1/5/2025).

Massa buruh yang menggelar aksi ini tampak mengenakan berba-



Massa buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI. (Foto Detik)

gai atribut dari organisasi masing-masing, mulai dari bendera, spanduk-spanduk, hingga ogoh-ogoh yang menggambarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan sebuah kepala babi. Dalam spanduk yang mereka bawa, terdapat berbagai macam tuntutan.

Tuntutan mereka antara lain adalah mendesak agar UU Cipta Kerja beserta peraturan pemerintah (PP) yang menjadi turunannya dicabut, menghentikan PHK, serta segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang pro-buruh dan memberikan kepastian serta jaminan kerja yang layak bagi buruh. Mereka juga meminta agar RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) segera disahkan untuk memberikan jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga.

Selain itu, mereka mendesak agar hubungan kemitraan dalam dunia kerja dihapuskan, serta meminta pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojek *online* (ojol), taksi *online*, dan kurir. Massa buruh juga menuntut jaminan dan perlindungan pekerja medis, pekerja perikanan dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pekerja pertambangan, serta buruh migran.

Selain isu-isu perburuhan, massa buruh juga menyampaikan tuntutan lainnya, antara lain mendesak untuk menghentikan pengusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang merusak lingkungan, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, serta mencabut UU TNI. (*)

ALARM UNTUK KEAMANAN PRODUK HALAL

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Serotan tajam datang dari kalangan senator terhadap temuan mencengangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hasil uji laboratorium terbaru menunjukkan sembilan produk makanan olahan yang beredar di pasaran mengandung unsur babi. Yang membuat geger, tujuh di antaranya telah mengantongi sertifikat halal. Temuan ini menimbulkan keresahan besar di tengah masyarakat, terutama umat Islam yang menggantungkan kepercayaan pada label halal sebagai jaminan keamanan konsumsi.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menyebut kasus ini sebagai “pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.” Ia menegaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan, baik dalam proses sertifikasi maupun distribusi produk, menjadi penyebab utama. Senator dari Daerah Khusus Jakarta itu menuntut BPJPH memperketat akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik. Ketegasan hukum dan pengawasan independen dari ormas Islam dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa.

Senator dari Nusa Tenggara Barat, TGH Ibnu Holil, tak kalah geram. Ia menyebut temuan ini sebagai tamparan keras bagi sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Menurutnya, jika suatu produk sudah bersertifikat halal, maka bahan-bahannya seharusnya

terjamin pula kehalalannya. Kenyataan bahwa unsur babi bisa lolos ke dalam produk berlabel halal sangat meresahkan masyarakat, terutama di tengah tingginya kesadaran umat Islam dalam menjaga konsumsi mereka.

TGH Ibnu Holil mengimbau masyarakat muslim untuk lebih waspada dan selektif dalam memilih makanan, terutama produk-produk olahan yang beredar di ritel modern. Ia mendorong BPOM dan BPJPH segera menarik semua produk yang terbukti mengandung unsur babi, serta memperketat pengawasan terhadap izin edar dan sertifikasi. “Jangan biarkan umat dirugikan dua kali—secara syariat dan secara psikologis,” tegasnya.

Adapun produk yang dinyatakan mengandung unsur babi dan telah bersertifikat halal antara lain Corniche Fluffy Jelly dan Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy asal Filipina, serta ChompChomp Car Mallow, ChompChomp Flower Mallow, ChompChomp Marshmallow Tabung, dan TYL Marshmallow Isi Selai Vanila asal Tiongkok. Dari dalam negeri, produk Hakiki Gelatin yang diproduksi di Indonesia juga turut tercatat dalam daftar temuan BPOM dan BPJPH.

Kasus ini menjadi pelajaran pahit sekaligus pengingat bahwa pengawasan produk halal tak boleh hanya mengandalkan label semata. Sertifikat halal harus menjadi bukti integritas, bukan sekadar formalitas. Dengan mendesaknya perbaikan sistem pengawasan, masyarakat berharap kejadian ini tidak terulang, dan rasa aman dalam mengonsumsi produk halal bisa kembali terjaga. (*)



Anggota DPD RI TGH Ibnu Holil
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Senator Sumbar Cerint Iralloza Tasya
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Tambang Serobot Tanah Adat, Senator Hasby Yusuf Angkat Suara



Anggota DPD RI Hasby Yusuf (Foto Istimewa)

Lela Sadiyah

Penulis

Maraknya aktivitas tambang nikel yang menyerobot tanah adat dan mencemari lingkungan di Maluku Utara mendapat sorotan tajam dari Senator DPD RI, Hasby Yusuf. Ia menyampaikan keprihatinan atas sikap arogan sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di daerah pemilihannya, yang menurutnya tidak hanya merusak alam tapi juga menginjak-injak hak masyarakat adat. “Ini bukan sekadar konflik lahan, tapi soal keadilan dan kelangsungan hidup masyarakat lokal,” ujar Hasby dikutip Brindonews, Rabu (23/4/2025).

Salah satu perusahaan yang dipersoalkannya adalah PT Sembaki Tambang Sentosa (STS), yang dituding telah menambang di kawasan tanah

adat seluas lebih dari 20 hektare tanpa persetujuan masyarakat adat Wayamli. Meski mendapat perlawanan dari Qimalaha Wayamli dan warga setempat, perusahaan tetap membandel. Hasby menilai, tindakan seperti ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak ulayat yang harus dilindungi.

Meski mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat, Senator Hasby mengingatkan bahwa izin bukanlah tiket untuk bertindak semena-mena. Menurutnya, aktivitas tambang harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan lingkungan. “Tidak boleh ada tambang yang mengorbankan ruang hidup masyarakat adat, mencemari alam, atau mengabaikan hak-hak pekerja lokal,” tegasnya.

Tak hanya PT STS, Hasby juga menyoroti perusahaan lain

seperti PT Priven Lestari, PT Alam Raya Abadi, dan PT Jaya Abadi Semesta, yang dituduh mencemari Kali Muria hingga merusak areal persawahan petani di Subaim, Kecamatan Wasile. Bahkan PT Position diketahui melaporkan 11 warga Desa Maba Sangaji ke polisi hanya karena memprotes pencemaran Sungai Sangaji. Bagi Hasby, kriminalisasi warga atas dasar pembelaan lingkungan adalah ironi demokrasi.

Ia menilai, siklus pelanggaran oleh perusahaan tambang di Maluku Utara terus berulang karena tidak pernah ditindak secara serius. Setelah didemo, perusahaan hanya bernegosiasi lalu kembali mengulang kesalahan. “Tambang yang masuk ke Halmahera Timur secara membabi buta menebas hutan dan mengunduli gunung itu adalah kiamat kecil bagi kami di Maluku Utara,” kata Hasby geram.

Hasby pun mendesak pemerintah daerah untuk bersikap lebih tegas dalam mengawasi perusahaan tambang. Ia juga meminta Kementerian ESDM tidak sembarangan mengeluarkan izin tanpa kajian sosial dan lingkungan yang matang. “Perusahaan jangan hanya datang membawa izin dari Jakarta, lalu seenaknya menggarap tanah rakyat. Masyarakat tidak boleh hanya jadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya. (*)

Peringatan Hardiknas 2025 Akses Pendidikan Belum Merata



Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Lela Sadiyah

Penulis

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Berkaitan dengan itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mirah Midadan Fahmid mengajak seluruh generasi muda untuk menjadikan pendidikan sebagai bekal utama dalam membangun masa depan yang berdaya saing, berkualitas dan berintegritas.

Menurutnya, Hardiknas Nasional bukan sekadar momentum seremoni, tetapi juga saat untuk merefleksikan tantangan dan peluang dunia pendidikan, terutama di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, rendahnya angka partisipasi pendidikan

“Pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan kurikulum, tetapi bagaimana kita menyiapkan generasi muda menjadi sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi perubahan global. Tantangan di depan semakin kompleks, oleh karena itu, generasi muda harus dibekali dengan keterampilan abad 21 yaitu kritis, kolaboratif, dan kreatif.”

Anggota DPD RI,
Mirah

menengah, serta kualitas infrastruktur sekolah yang belum merata.

“Pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan kurikulum, tetapi bagaimana kita menyiapkan generasi muda

menjadi sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi perubahan global. Tantangan di depan semakin kompleks, oleh karena itu, generasi muda harus dibekali dengan keterampilan abad 21 yaitu kritis, kolaboratif, dan kreatif,” ujar Senator Mirah.

Ia menyoroti kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah NTB. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah di NTB masih berada di angka 7,74 tahun. Angka itu menunjukkan bahwa banyak anak di usia produktif belum menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan afirmatif, terutama bagi kelompok marjinal dan wilayah 3T (tertinggal, terdapat, dan terluar).

Dalam konteks nasional, Mirah mendukung transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka dan peningkatan anggaran pendidikan untuk wilayah dengan IPM rendah. Ia berharap agar pendidikan vokasional dan keterampilan berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan, kelautan, hingga pariwisata di NTB dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis pendidikan. (*)

Jadikan Peringatan Hardiknas Momen Refleksi Pendidikan

Aryo P Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengharapkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 menjadi momen reflektif untuk menakar ulang posisi pendidikan dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Ideal sistem pendidikan sudah tidak lagi hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi sebagai pilar utama pembentuk karakter, kompetensi, dan daya saing kualitas manusia Indonesia.

“Di tengah gegap gemapita bonus demografi dan transformasi digital global, Indonesia harus bisa menjawab pertanyaan mengenai apakah pendidikan sudah benar-benar menjadi daya ungkit bagi kemajuan bangsa. Cita-cita Indonesia menjadi negara maju hanya tinggal 20 tahun lagi,” kata senator dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu, Jumat (2/5/2025).

Menjadikan pendidikan sebagai daya ungkit menuju Indonesia Maju 2045 membutuhkan lompatan paradigma dan strategi sistemik yang berkelanjutan. Fahira menyebutkan empat langkah strategis. Pertama, penguatan kualiti



Upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Foto ilustrasi info-lampung.net)

tas dan profesionalisme guru. Reformasi pendidikan tidak akan bermakna tanpa guru sebagai jantung perubahan.

Kedua, reorientasi kurikulum dan pembelajaran kontekstual. Kurikulum harus memastikan pembelajaran berbasis kontekstual, lintas disiplin, serta menekankan *deep learning* dan pengembangan nilai kejujuran, integritas, kedisiplinan, semangat, dan kreativitas dan nilai kebaikan lainnya. Ini harus menjadi poros utama kurikulum, bukan hanya sebagai pelengkap.

Ketiga, digitalisasi dan internasionalisasi. Digitalisasi pendidikan penting dipercepat dengan memastikan kesetaraan akses, untuk mencegah *digital divide* atau

kesenjangan digital baru. Di tingkat pendidikan tinggi, internasionalisasi idealnya tidak dimaknai sebagai westernisasi, tetapi sebagai glokalisasi yang mengakar pada budaya lokal sambil bertarung di panggung global.

Keempat, pendidikan inklusif dan redistribusi sumber daya. Untuk menutup disparitas pendidikan, alokasi anggaran harus berbasis keadilan spasial. Sekolah-sekolah di daerah harus mendapat prioritas investasi infrastruktur dan SDM. Perlu juga insentif bagi pemda yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan. Ini penting, karena tanpa redistribusi, ketimpangan akan terus menggerogoti impian Indonesia Emas 2045. (*)

Pendidikan di Papua Selatan:

Membangun SDM Unggul dengan Perhatian Ekstra

Rini Sumarni

Penulis

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama dalam memajukan Provinsi Papua Selatan. Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sularso, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi pendidikan di wilayah tersebut. Menurutnya, meskipun zaman terus berkembang pesat dengan teknologi yang semakin canggih, sektor pendidikan di Papua Selatan masih memerlukan perhatian ekstra agar bisa mengejar ketertinggalan dan mencetak generasi muda yang terampil, unggul, dan berkualitas.

Sularso menyadari bahwa pendidikan yang baik adalah kunci untuk menciptakan SDM yang mandiri dan profesional. Pendidikan bukan hanya tentang pengajaran di sekolah, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk belajar dan berkembang. "Kondisi pendidikan di Papua Selatan membutuhkan perhatian ekstra dan luar biasa," ujarnya saat mengunjungi wilayah tersebut pada Kamis, 24 April 2025. Ia berharap agar kondisi ini dapat segera teratasi dengan adanya

kebijakan dan program yang terarah dari pemerintah pusat dan daerah.

Pendidikan yang memadai bukan hanya soal infrastruktur sekolah, tetapi juga melibatkan perhatian lebih terhadap berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak. Salah satu faktor penting yang disebutkan Sularso adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak di Papua Selatan.

Sularso juga mendukung penuh, program "Sekolah Rakyat" yang diusung Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap anak yang berusia sekolah, namun terhalang oleh masalah ekonomi atau lingkungan yang kurang mendukung. "Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa langsung jalan. Di Provinsi Papua Selatan ada yang infrastrukturnya sudah siap, tetapi masih perlu pembenahan, seperti ketersediaan tenaga pendidik, dan infrastruktur sekolah yang masih harus dilengkapi," ujarnya.

Sularso mengakui bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan program ini memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, ia

menekankan pentingnya pemanfaatan sekolah-sekolah yang sudah ada untuk segera disesuaikan dengan kebutuhan program Sekolah Rakyat. Infrastruktur yang sudah tersedia di beberapa daerah dapat dijadikan sarana untuk memulai pendidikan dasar bagi anak-anak yang belum mendapat kesempatan sekolah.

Selain itu, Sularso juga mengusulkan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di Papua Selatan. Program ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk memastikan anak-anak di Sekolah Rakyat tetap terjaga kesehatannya, sehingga mereka bisa belajar dengan optimal.*



Anggota DPD RI Sularso
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pelabuhan Doro Terbengkalai, Senator Graal Minta Evaluasi Serius

Arso P Nugroho

Penulis

Di tengah harapan besar masyarakat akan hadirnya infrastruktur penyeberangan laut yang memadai, Pelabuhan Feri Doro di Kabupaten Halmahera Utara justru menyisakan kekecewaan. Pelabuhan yang seharusnya menjadi penghubung vital antara Halmahera Utara dan Halmahera Timur itu kini tampak terbengkalai. Dermaga yang patah dan ruang tunggu yang rusak menjadi potret menyedihkan dari proyek bernilai besar yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Senator asal Maluku Utara, Graal Taliawo, menyoroti langsung kondisi pelabuhan tersebut. Dalam kunjungannya, ia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi fisik fasilitas yang dibiarkan rusak tanpa kejelasan tindak lanjut. “Ironis, karena fasilitas yang dibangun pasti dengan biaya mahal tetapi dibiarkan terbengkalai. Ini jelas pemborosan anggaran,” ujar Graal, Minggu, 27 April 2025.

Menurut Graal, Pelabuhan Doro yang berada di wilayah Kao seharusnya menjadi sarana penyeberangan strategis menuju Kabupaten Halmahera Timur, baik ke Pelabuhan Wasile maupun Subaim.



Pembangunan Pelabuhan Doro di Kabupaten Halmahera Utara yang terbengkalai. (Foto Antara)

Jika difungsikan sebagaimana mestinya, pelabuhan ini akan sangat membantu mempercepat mobilitas masyarakat dan memangkas waktu tempuh yang selama ini harus dilalui melalui jalur darat berjam-jam lamanya.

Ia pun mempertanyakan kelayakan studi awal pembangunan pelabuhan tersebut. Lokasi pelabuhan yang dipilih berada di kawasan dengan ombak kencang dan perairan penuh karang, menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara matang. “Saya menduga studi kelayakannya asal-asalan. Ini menunjukkan ketidakseriusan dalam perencanaan,” tegas anggota Komite II DPD RI yang membidangi perhubungan ini.

Graal juga menyampaikan niatnya untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, apakah pembangunan pelabuhan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Jika berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka ia meminta Gubernur dan jajarannya untuk bertanggung jawab dan segera melakukan pembenahan.

Melalui sorotannya terhadap Pelabuhan Doro, Graal Taliawo berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran penting agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada fisik bangunan, tetapi juga menyentuh aspek manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur tanpa fungsi hanyalah monumen kegagalan, dan di tengah keterbatasan anggaran pembangunan, setiap rupiah harusnya menjadi jawaban atas kebutuhan rakyat. (*)

Senator Temui Menekraf, Bahas Jalan Keluar Pengangguran Daerah

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Isu pengangguran di daerah kembali menjadi perhatian serius sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada Jumat, 18 April 2025, enam senator dari berbagai provinsi bertemu langsung dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefki Harsa, di Kantor Kemenparekraf, Jakarta. Mereka adalah Azhari Cage (Aceh), Alfiansyah Bustami (Jawa Barat), Bisri As Shiddiq Latuconsina (Maluku), Muhammad Azran (Jakarta), Gus Adib Puad (Papua Selatan), dan Bustami Zainudin (Lampung).

Dalam pertemuan tersebut, Senator Azhari Cage mengungkapkan kegelisahan dari daerah asalnya, Aceh. Menurutnya, banyak lulusan sarjana yang terpaksa menganggur karena minimnya lapangan pekerjaan. Padahal, kata dia, para pemuda ini memiliki modal dasar yang sangat potensial: kemampuan berpikir dan perangkat digital seperti laptop. “Kalau mereka dibina dan dimodali, tentu bisa menciptakan peluang kerja dan bahkan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya penuh semangat.

Menteri Teuku Riefki menyambut baik masukan



Sejumlah anggota DPD RI bertemu Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefki Harsa. (Foto Istimewa)

para senator. Ia menjelaskan bahwa ekonomi kreatif sejatinya menawarkan jalan keluar yang sangat realistis untuk mengatasi pengangguran, khususnya di kalangan pemuda. “Kreativitas adalah modal utama. Dari ide-ide sederhana bisa lahir industri bernilai besar, seperti yang terjadi pada brand global seperti Pokémon atau Hello Kitty,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya bergerak di bidang seni atau hiburan semata, tetapi juga mencakup sektor digital, elektronik, hingga inovasi teknologi. Cabang-cabang usaha baru yang lahir dari aktivitas kreatif, menurutnya, bahkan berkontribusi lebih besar dari sektor utamanya. Ini membuktikan bahwa kreativitas adalah sumber daya strategis bagi pembangunan ekonomi masa depan.

Menanggapi antusiasme para senator, Teuku Riefki mendorong setiap daerah agar segera membentuk dinas ekonomi kreatif di tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan begitu, pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif bisa dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan. “Jika ini dilakukan, kita akan punya jaringan pembinaan yang kuat dari pusat hingga ke daerah,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa membuka peluang baru untuk mengatasi masalah klasik seperti pengangguran. Para senator pun berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan ekonomi kreatif di daerah masing-masing sebagai strategi penting membangun masa depan yang lebih produktif dan mandiri. (*)

Kaltim Siapkan Lahan, Kantor DPD RI Segera Dibangun di Samarinda



Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud bersama sejumlah anggota DPD RI. (Foto Pemprov Kaltim)

Nanda Russia Rola

Penulis

Kabar baik datang bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, khususnya bagi para senator dari Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan akan menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor DPD RI di Kota Samarinda. Proses koordinasi dengan instansi terkait tengah dilakukan agar penetapan lokasi bisa segera rampung.

Dalam pertemuan dengan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI di Ruang Rapat Gubernur, Senin (21/4/2025), Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan komitmennya mendukung kehadiran fisik lembaga senator di daerah. "Nanti Pak Muzakkir dari BPKAD akan mengoordi-

nasikan kelanjutan proses hibah tanah ini," ujar Rudy. Ia menyatakan dukungan legislator pusat, termasuk para senator, sangat penting dalam suksesnya pembangunan di daerah.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja PURT DPD RI dalam rangka monitoring dan evaluasi kantor perwakilan DPD RI di Kalimantan Timur. Saat ini, kantor DPD RI di Kaltim masih menumpang di gedung instansi lain. "Kami berharap tanah ini segera dihibahkan, agar bisa dibangun kantor yang representatif," ujar Ketua PURT DPD RI Hasan Basri.

Senator Hasan Basri menambahkan, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, baru 15 provinsi yang secara resmi telah menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor DPD RI. Ia berharap Kaltim

menjadi provinsi ke-16, agar pembangunan kantor bisa segera dianggarkan oleh Kementerian PUPR melalui dana APBN.

Kunjungan PURT DPD RI ini juga dihadiri oleh para senator dari berbagai daerah, termasuk Senator Yulianus Henock Sumual (Kaltim), Umu Rudi Kabunang (NTT), Ahmad Nawardi (Jawa Timur), dan senator asal Riau. Kehadiran mereka menjadi bentuk nyata dukungan penuh terhadap penguatan keberadaan DPD RI di daerah.

Dengan adanya kantor sendiri di Kaltim, DPD RI diharapkan bisa lebih optimal dalam menjalankan fungsi representasi daerah. Keberadaan kantor permanen juga akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap wakil-wakil daerah mereka di Senayan. (*)

Ratusan Calon Dokter Uncen Terancam *Drop Out*: DPD RI Turun Tangan

M. Fathoni

Penulis

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma bersama senator David Harold Waromi dan Arianto Kogoya melakukan kunjungan kerja ke Universitas Cenderawasih (Uncen), menyikapi kasus ratusan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang terancam dikeluarkan (*drop out*) akibat persoalan administratif dan pembiayaan.

Dalam pertemuan dengan Rektor Uncen dan jajarannya, para senator menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus apresiasi atas upaya kampus mencari solusi. “Kami melihat keseriusan Rektor dan seluruh jajaran Uncen dalam menyelamatkan masa depan para mahasiswa ini. Ini bentuk komitmen terhadap pendidikan berkualitas di Papua,” ujar Filep.

Filep menyoroti adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan justru menghambat kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Padahal, kedua sektor ini merupakan bagian penting dari visi pembangunan Papua: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif.

Dari hasil advokasi, Filep menyebutkan bahwa beasiswa dari pemerintah daerah sebenarnya telah dialokasi-



Ketua Komite III DPD RI Filep Mawafma didampingi Senator David Harold Waromi dan Arianto Kogoya bersama Rektor Universitas Cenderawasih bersama jajarannya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“ Kami mendorong agar ke depan penyaluran dana pendidikan, terutama untuk biaya kuliah, ditransfer langsung ke kampus. Dengan begitu, kampus bisa ikut mengelola dan memastikan dana tepat sasaran. Sementara biaya hidup tetap bisa disalurkan ke mahasiswa. ”

**Ketua Komite III
DPD RI,
Filep Wamafma**

kan. Namun, karena pencairan dilakukan langsung ke rekening mahasiswa, dana

tersebut kerap tidak digunakan sesuai peruntukannya.

“Kami mendorong agar ke depan penyaluran dana pendidikan, terutama untuk biaya kuliah, ditransfer langsung ke kampus. Dengan begitu, kampus bisa ikut mengelola dan memastikan dana tepat sasaran. Sementara biaya hidup tetap bisa disalurkan ke mahasiswa,” jelasnya.

Komite III DPD RI yang membidangi sektor pendidikan akan segera mengordinasikan penyelesaian persoalan ini dengan Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. “Jangan sampai ada generasi muda Papua gagal jadi dokter hanya karena persoalan teknis,” tegas Filep. (*)

Sultan Optimistis Koperasi Merah Putih Dorong Industrialisasi di Desa

Helena AF Ojan

Penulis

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dapat menjadi solusi atas fenomena deindustrialisasi yang tengah terjadi di Indonesia.

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu mengungkapkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 19,89 persen pada 2024. Menurutnya, angka ini dapat terus tumbuh apabila program-program pemerintah yang padat modal, seperti Koperasi Merah Putih, diterjemahkan menjadi koperasi produksi di setiap desa.

“Deindustrialisasi dan maraknya praktik lintah darat serta pinjaman *online* sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, kita patut mendukung kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang berani mengambil langkah tidak populis, demi menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global saat ini,” ujar Sultan, Rabu (23/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja negara



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Deindustrialisasi dan maraknya praktik lintah darat serta pinjaman *online* sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, kita patut mendukung kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang berani mengambil langkah tidak populis, demi menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global saat ini.”

**Ketua DPD RI,
Sultan B Najamudin**

ke sektor keuangan dan investasi memang memunculkan *shock culture* dalam birokrasi, namun juga berperan sebagai *shock absorber* dalam ekonomi nasional. Pergeseran dari belanja konsumtif ke arah

kebijakan yang sistematis dan produktif dinilai sebagai langkah yang strategis.

“Dampak dari kebijakan ini memang tidak langsung terasa, tapi akan memberi fondasi kuat bagi perekonomian dalam jangka panjang. Wajar jika saat ini terjadi perubahan suasana sosial dan ekonomi, termasuk keputusan pasar dalam berinvestasi,” tambahnya.

Meski ruang fiskal terbatas dan tekanan ekonomi global masih membayangi, Sultan tetap optimistis pemerintah mampu membaca peluang dan mengubah tantangan menjadi keuntungan ekonomi. “Dengan bonus demografi, kekayaan sumber daya, dan infrastruktur yang terus berkembang, kita akan menyaksikan tumbuhnya koperasi pengolahan kelapa, kopi, perikanan, dan sektor-sektor produksi lainnya di desa-desa,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. (*)

Tiga Sektor Strategis Dorong Pembangunan Makro di Jateng

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Anggota DPD RI Abdul Kholik menyebutkan tiga sektor strategis yang dinilai mampu mendorong pembangunan makro di Jawa Tengah, yakni sektor pertanian, maritim, dan pariwisata. Hal ini disampaikan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* bertema “Mewujudkan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Kawasan”, yang digelar di Kantor DPD RI Jateng, Semarang, Rabu (23/4/2025).

Kholik menjelaskan, sektor pertanian menyumbang 13,23 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Subsektor unggulan meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. “Jateng merupakan produsen padi terbesar ketiga nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan jumlah petani mencapai 4,4 juta orang dan menyerap lebih dari 15 juta tenaga kerja. Ketangguhan sektor ini bahkan terbukti saat pandemi COVID-19,” ujarnya.

Di sektor maritim, Abdul Kholik menyoroti potensi besar dari luas perairan Jateng yang mencapai 17 ribu kilometer persegi dan garis



FGD bertema “Mewujudkan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Kawasan” di Kantor DPD RI Jawa Tengah. (Foto Suara Merdeka)

“**Jateng merupakan produsen padi terbesar ketiga nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan jumlah petani mencapai 4,4 juta orang dan menyerap lebih dari 15 juta tenaga kerja. Ketangguhan sektor ini bahkan terbukti saat pandemi COVID-19.**”

Anggota DPD RI,
Abdul Kholik

pantai sepanjang 1.127 km. “Produksi perikanan tangkap dan budidaya lebih dari 968 ribu ton per tahun dengan jumlah nelayan mencapai 188.522 orang. Jika dikelola

lebih terstruktur, sektor ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru,” katanya.

Sementara itu, sektor pariwisata Jateng mencatatkan lebih dari 69 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2024, termasuk 593 ribu wisatawan mancanegara. Dengan 1.607 objek wisata aktif dan berbagai agenda budaya tahunan, sektor ini menyerap hingga 24,4 juta tenaga kerja.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang turut hadir menyampaikan bahwa arah pembangunan Jateng dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan usulan DPD RI. “Kami fokus pada peningkatan investasi, kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur. Usulan dari DPD RI ini sangat relevan,” ujarnya. (*)

DPD RI Siap Kolaborasi dengan KOI Siapkan Kader Olimpiade dari Daerah



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menghadiri pembukaan rapat anggota KOI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Betria Eriani

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atas dedikasinya dalam mencetak atlet-atlet berprestasi yang membawa nama baik Indonesia di panggung olahraga internasional. Menurutnya, kerja KOI selama ini telah menunjukkan arah pembinaan yang terencana dan berorientasi jangka panjang.

“Kami juga mengapresiasi inisiatif KOI dalam membentuk atlet yang unggul secara akademik melalui program *student athlete*. Atlet Olimpiade Indonesia tidak hanya

harus tangguh secara fisik dan mental, tetapi juga cakap dalam ilmu pengetahuan sebagaimana pelajar dan mahasiswa pada umumnya,” ujar Sultan saat membuka Rapat Anggota KOI di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Sultan menegaskan pentingnya pendekatan yang merata dalam pembinaan atlet nasional. Ia menyoroti perlunya pencarian dan pembinaan talenta olahraga yang dimulai dari tingkat daerah. Menurutnya, potensi besar masih tersembunyi di berbagai pelosok Indonesia yang selama ini belum mendapatkan akses pembinaan yang memadai.

“DPD RI siap berkolaborasi dengan KOI untuk menjaring, membina, dan

menyiapkan kader-kader olimpiade Indonesia dari daerah. Dengan peluang bonus demografi serta pengelolaan pelatihan yang profesional dan terukur, saya optimistis kita mampu mencetak lebih banyak juara dan meraih prestasi lebih tinggi di ajang internasional,” kata Sultan.

KOI, sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas partisipasi Indonesia dalam ajang seperti Olimpiade Musim Panas, Asian Games, dan SEA Games, juga memiliki mandat untuk membina ekosistem olahraga nasional. Sultan berharap KOI terus berinovasi, tidak hanya dalam bidang pelatihan atlet, tetapi juga dalam tata kelola dan perluasan jangkauan pembinaan ke berbagai daerah.

Menanggapi rencana Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade Remaja (*Youth Olympic*) Tahun 2030, Sultan menegaskan bahwa DPD RI secara kelembagaan mendukung penuh inisiatif tersebut. “Menjadi tuan rumah *event* internasional bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan semangat kebangsaan. DPD RI siap menjadi bagian dari ikhtisar besar ini,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. (*)

Senator Rifki Farabi Dukung PON 2028 di NTB dan NTT

Theresia Oktavina

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Rifki Farabi, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2028 yang direncanakan digelar di Provinsi NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Senator muda ini, kesempatan menjadi tuan rumah *event* olahraga terbesar di Indonesia tersebut harus diperjuangkan bersama oleh semua elemen daerah.

“Momentum ini tidak datang dua kali. Ini sangat besar dampaknya, tidak hanya untuk pergerakan ekonomi daerah, tapi juga untuk peningkatan prestasi atlet lokal dan pembangunan infrastruktur olahraga. Secara pribadi dan sebagai wakil daerah, saya sangat mendukung dan mendorong agar NTB benar-benar terpilih sebagai tuan rumah,” tegas Rifki Farabi, Kamis (24/4/2025).

Senator Farabi mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi politik dengan berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang juga berasal dari NTB.



Anggota DPD RI Muhammad Rifki Farabi (Foto Istimewa)

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas langkah-langkah strategis untuk memastikan kepastian NTB menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON 2028.

Menurutnya, Lalu Hadrian Irfani akan mengundang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI sebagai mitra kerja Komisi X untuk membahas lebih lanjut kesiapan dan **penetapan** NTB sebagai tuan rumah PON dalam rapat kerja yang dijadwalkan pada 5 Mei 2025 mendatang. “Ini perjuangan bersama. Tidak cukup hanya di tingkat daerah, tapi juga harus diperjuangkan di tingkat pusat,” ujar Farabi.

Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB tetap optimistis bahwa Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah ber-

sama NTT, meskipun sempat muncul keraguan dari berbagai pihak. Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan persiapan pelaksanaan PON kepada Penjabat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, termasuk kesiapan infrastruktur dan venue olahraga.

Mori menyebut kesiapan *venue* di NTB telah mencapai 85 persen. Beberapa fasilitas tersebut akan diuji coba dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2026. Misalnya, *venue* panahan yang direncanakan berada di Sumbawa akan digunakan lebih dulu dalam Porprov sebagai bagian dari uji kelayakan menjelang PON 2028. “Ini bentuk keseriusan kami dalam mewujudkan NTB sebagai tuan rumah yang siap dan layak,” ujarnya. (*)

Ketua DPD RI Tawarkan Kerja Sama Daerah ke Sichuan

Rini Sumarni

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menawarkan peluang investasi di daerah-daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, teknologi, pertanian, pendidikan, pariwisata, dan lainnya kepada Gubernur Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Shi Xiaolin.

Sultan menyebut, Indonesia memiliki potensi daerah yang besar, seperti batu bara, litium hidroksida, herbisida, pariwisata, logistik, dan proyek perlindungan tanaman hijau. Karena itu, Indonesia perlu dukungan perluasan hubungan ekonomi bisnis dengan negara yang memiliki pasar dan manajemen bisnis yang baik. Sedangkan Sichuan merupakan salah satu provinsi yang besar di RRT dengan pertumbuhan perekonomian cepat.

“Maka saya menginisiasi agar anggota DPD RI menawarkan peluang investasi dalam bentuk sumber daya alam, teknologi, pertanian, pendidikan, pariwisata, dan lainnya. Sehingga berpotensi untuk mengembangkan perekonomian, pendidikan, teknologi, dan bisnis dari hulu ke hilir yang ada di daerah,”



Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin didampingi Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bersama Gubernur Sichuan, RRT Shi Xiaolin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kata Sultan B. Najamudin saat menerima kunjungan Gubernur Sichuan Shi Xiaolin, Jumat (25/4/2025).

Sultan menambahkan bahwa perkembangan provinsi di RRT sangat cepat, sehingga diharapkan dapat terwujud *sister city*. “Saya berharap bisa terjalin kerja sama internasional dan antardaerah yang biasa dikenal dengan istilah *sister city*. Jika potensi daerah sudah *qualified* dan bisa dikerjasamakan dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi, dan kemudian difasilitasi duta besar, maka saya percaya progresnya akan sangat positif bagi daerah,” ujar Sultan.

Gubernur Sichuan, Shi Xiaolin, mengapresiasi tawaran kerja sama dari DPD RI di berbagai sektor karena hal tersebut selaras dengan tu-

juan kedatangan mereka. “Ini adalah kunjungan pertama kali saya ke luar negeri, dan kunjungan ke Indonesia kali ini kami merasa tidak sia-sia, karena tujuan kami juga sama dengan semangat kerja sama dari Indonesia,” papar Shi Xiaolin.

Shi Xiaolin juga menyampaikan bahwa pasar Sichuan yang paling besar adalah Asia. Dirinya menilai ada beberapa proyek dengan Indonesia yang sudah berhasil, seperti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dirinya juga menyampaikan bahwa pada pameran pendidikan di Bandung beberapa waktu lalu, RRT memberikan 100 beasiswa untuk pelajar Indonesia. Shi Xiaolin menilai kerja sama dengan Indonesia saat ini berada dalam tahap yang paling baik sepanjang sejarah. (*)

Lahan Pertanian Abadi di Daerah Perlu Ditetapkan dengan Perpres

M. Fathoni

Penulis

Menyusul adanya informasi keengganan pemerintah daerah yang tidak mengusulkan penetapan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan presiden terkait penetapan lahan pertanian dan pangan abadi tersebut.

Sebenarnya, menurut Sultan, kawasan lahan pertanian pangan abadi sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan mengenai perlindungan lahan abadi diamanahkan untuk diatur melalui Pasal 48 ayat 2 UU Penataan Ruang tersebut.

“Jika melihat urgensinya, maka program swasembada pangan dan energi merupakan kebijakan pemerintah yang seharusnya wajib didukung oleh semua pihak. Sehingga pemerintah perlu tegas menetapkan porsi luasan lahan abadi pertanian di setiap daerah melalui keputusan presiden atau peraturan



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

presiden,” kata Senator Sultan, Senin (28/4/2025).

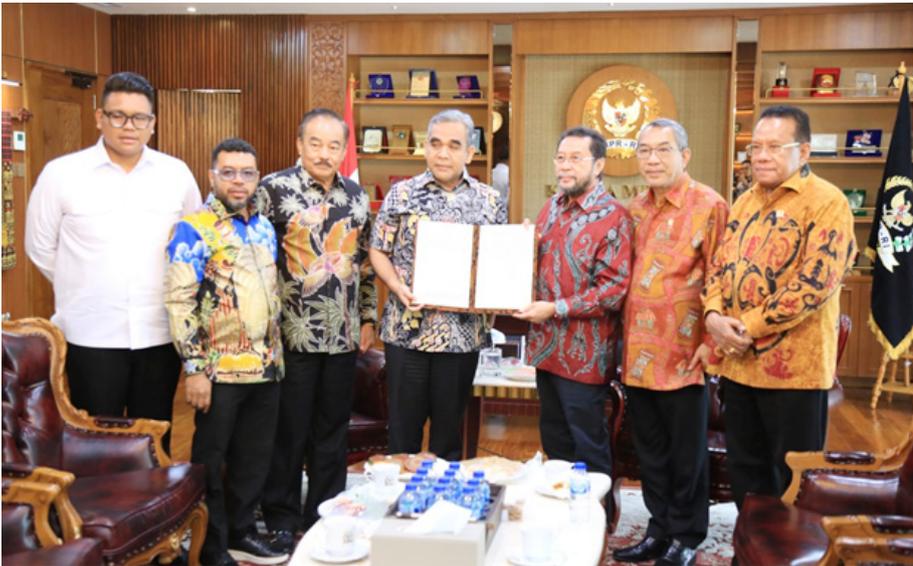
Menurutnya, dengan Perpres Lahan Pertanian Abadi, pemerintah daerah tidak memiliki alasan untuk tidak mendukung atensi serius Presiden Prabowo pada program kemandirian pangan dan energi nasional. Jika diperlukan, pemerintah bisa memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang kooperatif dan siap mendukung program pemerintah tersebut.

Pemetaan lahan pertanian dan pangan yang proporsional, kata Sultan, akan sangat menentukan serta menjamin ketersediaan dan kemandirian pangan nasional di masa depan. Hal ini harus dimulai dari daerah sebagai basis industri pertanian dan pangan. “Penurunan luas lahan

pertanian kita dari tahun ke tahun cukup signifikan. Jika tidak diantisipasi secara tegas dengan pendekatan ekstensifikasi, produktivitas dan ketahanan pangan nasional akan terus mengalami penurunan,” tegasnya.

Sultan menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk bersedia mendukung program-program prioritas pemerintah, terutama program swasembada pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Anggota DPD RI dari setiap daerah siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong akselerasi program swasembada pangan berbasis potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah. (*)

MPR For Papua Resmi Terbentuk, Yorrys Raweyai Ditunjuk sebagai Ketua



Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menerima SK Pengurus MPR For Papua dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Lela Sadiyah

Penulis

MPR For Papua yang diketuai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai resmi terbentuk, yang ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengurus MPR For Papua Tahun 2025–2030 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Anggota MPR For Papua terdiri atas seluruh anggota MPR RI dari enam provinsi di wilayah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Total anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan wilayah Papua sebanyak 42 orang.

“MPR For Papua menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik.”

Ketua MPR RI,
Ahmad Muzani

Wadah ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR RI untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“MPR For Papua menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai per-

soalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Muzani berpesan agar dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR For Papua lebih aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh berbagai pandangan dan merumuskan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sementara itu, Yorrys Raweyai, senator asal Papua Selatan, mengatakan bahwa forum ini bertujuan membangun komunikasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan di Tanah Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan.

“MPR For Papua secara intens segera melakukan komunikasi kepada pemerintah dan *stakeholder* guna mengatasi persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Salah satunya adalah persoalan *Food Estate* di wilayah Papua. Program *Food Estate* ini kurang tepat pemilihan lokasinya, sehingga lahan padi yang sejatinya sebagai lumbung pangan malah saat ini terendam air. Karena itu, harus adaantisipasi dan penanganan lebih lanjut,” ujar Yorrys. (*)

Haji Uma Minta Dikaji Ulang Penambahan Batalyon TNI di Aceh

Nanda Russia Rola

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta Kementerian Pertahanan untuk mengkaji ulang rencana penambahan empat batalyon TNI di wilayah teritorial Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda. Alasannya, kondisi keamanan Aceh saat ini dinilai semakin kondusif dan damai.

“Kami menerima banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat, serta menyikapi reaksi elemen sipil di Aceh. Maka dari itu, kami meminta agar rencana pembangunan batalyon baru di Aceh dikaji ulang,” ujar Haji Uma, Rabu (30/4/2025), menanggapi rencana pembangunan empat batalyon TNI di daerah pemilihannya.

Haji Uma menambahkan bahwa Aceh merupakan daerah berstatus otonomi khusus, yang merupakan hasil dari perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis seperti penambahan personel militer harus mempertimbangkan berbagai aspek,



Tentara Nasional Indonesia sedang melaksanakan apel pagi. (Foto ilustrasi Aceh-timur.net)

“**Kami menerima banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat, serta menyikapi reaksi elemen sipil di Aceh. Maka dari itu, kami meminta agar rencana pembangunan batalyon baru di Aceh dikaji ulang.**”

**Anggota Komite I DPD RI,
Sudirman**

terutama kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.

Menurutnya, penambahan batalyon bukan merupakan kebutuhan mendesak saat ini, mengingat situasi keamanan Aceh yang stabil dan damai. Ia menilai, penguatan pembinaan wilayah dan pening-

katan peran TNI dalam mendukung pembangunan daerah seharusnya menjadi prioritas utama.

“Kondisi Aceh saat ini sangat kondusif, dan potensi perdamaian semakin kuat. Karena itu, penambahan batalyon bukanlah prioritas. Penguatan pembinaan wilayah serta kontribusi TNI dalam pembangunan di wilayah Kodam Iskandar Muda jauh lebih penting saat ini,” tegas Haji Uma.

Penolakan terhadap rencana penambahan batalyon juga disuarakan oleh Ketua Umum Front Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan (FOMAPAK), Tarmizi. Ia menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan MoU Helsinki yang menjadi dasar perdamaian antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2005. (*)

LaNyalla: Negara Harus Berperan Aktif dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan

Dien Anggota DPD / MPR-RI

LA NYALLA MAHMUD MATTALITI

Surabaya, 21 April 2025



Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Surabaya Heru Sri Rahayu. (Foto LaNyalla Center)

Theresia Oktavina

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa negara harus memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Ia juga menekankan perlunya sosok pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara bijaksana dalam menjalankan negara.

Berbicara di hadapan para nelayan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/4/2025), LaNyalla menjelaskan pandangan para pendiri bangsa mengenai sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Dalam filosofi Pancasila, kata

LaNyalla, rakyat selalu ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Oleh karena itu, seluruh orientasi konstitusi Indonesia dipusatkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Para pendiri bangsa menempatkan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan dalam melaksanakan misi yang tertulis di pembukaan konstitusi. Pasal tersebut memuat makna yang sangat kuat dalam menentang liberalisasi ekonomi ala Barat, di mana yang kuat akan menang. Dalam Pasal 33 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan,” jelas LaNyalla.

Menurutnya, makna “usaha bersama” sangat jelas, yakni

bahwa rakyat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ekonomi nasional dan turut serta dalam proses produksi nasional. Dengan demikian, rakyat harus memiliki alat produksi dan masuk dalam sistem kelembagaan perekonomian. Sementara asas kekeluargaan merupakan antitesis dari liberalisme yang hanya menguntungkan pemilik modal dan kekayaan.

LaNyalla menguraikan tiga indikator utama untuk menilai sejauh mana rakyat terlibat dalam proses produksi perekonomian nasional. *Pertama*, rakyat ikut memiliki atau menjadi bagian dari kepemilikan proses produksi tersebut. *Kedua*, masyarakat di wilayah itu ikut menentukan keputusan-keputusan dalam proses produksi. *Ketiga*, rakyat turut bertanggung jawab terhadap masa depan dan keberlanjutan proses produksi tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan ketika terjadi pembangunan yang berdampak pada pemindahan atau pengosongan wilayah yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Model pembangunan tersebut, kata LaNyalla, harus mengedepankan keterlibatan dan kepentingan rakyat. (*)

Warga Berkeluh ke Nono Sampono, Kesenjangan Pendidikan di Maluku



Anggota DPD RI Nono Sampono dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di Ambon. (Foto Tim Nono Sampono)

Adhi Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Maluku, Nono Sampono, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (24/4/2025). Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, organisasi pemuda dan perempuan, tenaga pendidik, hingga warga dari sejumlah kelurahan.

“Saya hadir bukan hanya sebagai wakil rakyat, tapi sebagai bagian dari masyarakat Maluku yang ingin memastikan suara kita terdengar dan mendapat perhatian di tingkat nasional,” ujar Nono

mengawali pertemuan.

Dalam dialog tersebut, masyarakat mengeluhkan kesenjangan pembangunan antara pusat kota dan daerah pinggiran, terutama terkait fasilitas pendidikan dan infrastruktur dasar. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru dan sarana belajar, sementara akses jalan dan fasilitas publik belum memadai.

Menanggapi hal itu, Nono Sampono menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat pusat dan memperjuangkannya melalui jalur legislasi serta pengawasan. Ia juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.

“Kita ingin pembangunan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa atau kota-kota besar. Maluku juga berhak mendapatkan perhatian dan dukungan yang proporsional dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Warga yang hadir menyambut positif langkah Nono Sampono yang turun langsung ke lapangan. Mereka berharap kegiatan semacam ini dapat rutin dilaksanakan sebagai wadah komunikasi yang efektif antara masyarakat dan wakil daerah di pusat.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun Maluku secara inklusif dan berkeadilan, serta memperkuat hubungan antara rakyat dan wakilnya di Senayan. (*)

Kolaborasi DPD RI dan Ombudsman Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan terobosan untuk bersinergi dengan Ombudsman dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dan pengaduan layanan publik. Ombudsman dengan mandatnya sebagai pengawas pelayanan publik, dapat berbagi data dan temuan pengaduan dengan BAP DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan.

Betria Eriani

Penulis

“Sinergitas yang terjalin antara Ombudsman dan DPD RI dalam upaya menciptakan tata kelola pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim dalam rapat dengar pendapat bersama Wakil Ketua BAP Ahmad Syauqi, di Gedung DPD RI, Senin (28/4/2025).

BAP DPD RI mencatat kasus-kasus terjadinya mal-administrasi dan pelanggaran wewenang yang terjadi pada masyarakat di daerah semakin meningkat kuantitasnya, namun belum bisa terselesaikan dan cenderung berlarut-



Pimpinan dan anggota BAP DPD RI bersama anggota Ombudsman. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

larut. Hal ini akibat adanya tumpang tindih kebijakan, benturan kepentingan, regulasi yang tidak jelas, dan fokus lembaga eksekutif yang mengabaikan prioritas penyelesaian permasalahan di masyarakat.

Anggota Ombudsman Dadan Suparjo Suharmawijaya dan Heri Susanto sepakat bahwa sinergi antara BAP DPD RI dengan Ombudsman dalam penanganan pengaduan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pemerintah. “Perlu kerja sama BAP DPD RI dan Ombudsman demi tercapainya pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang lebih optimal dan efektif. Namun masih harus dipilah sesuai kewenangan Ombudsman,” katanya.

Senada dengan itu, anggota Ombudsman Heri Susanto mengatakan bahwa kedua lembaga dapat bekerja sama dalam mengoordinasikan upaya penanganan pengaduan masyarakat, terutama dengan

adanya kantor perwakilan di daerah. “Ini cukup strategis, DPD RI konsen ke arah politis dan Ombudsman ke teknis. Dengan koordinasi antara Kantor DPD RI di ibu kota provinsi dengan Perwakilan Ombudsman daerah dapat menindaklanjuti laporan aduan masyarakat dengan lebih cepat,” kata Heri Susanto.

Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan masyarakat yang mengadukan permasalahannya kepada BAP DPD RI, antara lain, Perwakilan Warga Desa Gedung Agung dan Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; Perwakilan Eks Karyawan Petrochina International Ltd dan Petrogas Ltd; Perwakilan Aliansi Masyarakat Papua–Papua Barat (Marga Malibela); Perwakilan Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pengawas Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia; dan Perwakilan Masyarakat Adat Pancai Pao, Tana Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. (*)

Senator Sampaikan ke Menpar Masalah Pariwisata di Daerah

Helena AF Ojan

Penulis

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pembangunan pariwisata dilakukan merata di seluruh daerah.

“Kami mengharapkan pembangunan pariwisata dapat dilakukan merata di seluruh daerah. Tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah lain seperti Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Papua juga menyimpan banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan, baik secara nasional maupun internasional,” kata Wakil Ketua Komite III Dailami Firdaus saat memimpin rapat kerja bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (30/4/2025).

Dalam rapat tersebut, anggota Komite III menyampaikan pandangan dan isu-isu terkait pariwisata yang ada di daerah. Aji Mirni Mawarni dari Kalimantan Timur menyebut ada indikasi anomali dalam penerapan tempat wisata di Kalimantan Timur. Ia mencontohkan ada



Ketua Komite III DPD RI Filep Mawafma dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menandatangani kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

desa wisata yang hampir 100 persen lahannya merupakan lahan perkebunan, sebagian lagi berada di lahan pertambangan. Ia menanyakan apakah ini sudah sesuai aturan.

Senator Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan persoalan wisatawan yang meningkat, namun industri perhotelan menurun. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pengelolaan pariwisata di Bali. “Apakah penurunan fungsi hotel disebabkan oleh akomodasi ilegal? Pelaku *guest house* hanya memiliki izin rumah tinggal tapi dijadikan tempat wisata. Ini terjadi karena minim verifikasi lapangan,” katanya.

Ida Bagus juga mempersoalkan model pariwisata *sharing economy* yang memberikan pengaruh pada kuota dan zona. Pembatasan ini

menyebabkan *overtourism* seperti di daerah Canggus dan Ubud. Dirinya merekomendasikan model pariwisata *sharing economy* yang harus memperhatikan pemilik warga lokal, bukan investor luar atau asing.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati menyampaikan progres pariwisata di Indonesia. Ada pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara sekitar 2,2 juta di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. “Hal ini menunjukkan potensi dan pengelolaan pariwisata di Indonesia cukup baik. Dapat kami sampaikan juga bahwa sepanjang Januari sampai Februari 2025, jumlah kunjungan sebesar 1,89 juta kunjungan,” terangnya. (*)

Perkuat Implementasi UU PPMI Guna Cegah PMI Non-Prosedural

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai pentingnya perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebab, pahlawan devisa ini menghadapi sejumlah tantangan krusial, seperti keterbatasan penempatan di sektor formal, lemahnya pengawasan terhadap proses migrasi tenaga kerja, serta maraknya praktik ilegal dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya fenomena yang tengah viral di media sosial, yakni tagar “kabur aja dulu”. Fenomena ini mencerminkan realitas miris, di mana sebagian calon PMI tergoda janji manis para penyalur tenaga kerja ilegal dan memilih jalan pintas yang justru membahayakan keselamatan dan masa depan mereka.

“Fenomena ini harus menjadi perhatian serius. Negara hadir melalui UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang telah memberikan kerangka hukum untuk memastikan prosedur penempatan yang legal dan perlindungan komprehensif bagi PMI, mulai dari pra-penempatan, masa kerja, hingga pasca kerja,” kata Ketua Komite III, Filep



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Senior Project Associate IOM Indonesia Michael Yudha Winarno, usai menggelar rapat dengar pendapat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Fenomena ini harus menjadi perhatian serius. Negara hadir melalui UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang telah memberikan kerangka hukum untuk memastikan prosedur penempatan yang legal dan perlindungan komprehensif bagi PMI, mulai dari pra-penempatan, masa kerja, hingga pasca kerja.**

**Ketua Komite III
DPD RI,
Filep Wamafma**

Wamafma, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Senior Project Associate IOM Indonesia, Michael Yudha Winarno, Rabu (30/4/2025).

Karena itu, Komite III DPD RI mendesak pemerintah pusat

dan daerah untuk memperkuat implementasi UU PPMI. Salah satu langkahnya adalah dengan meningkatkan edukasi publik, khususnya di daerah-daerah kantong PMI, serta melakukan pengawasan ketat terhadap agen penyalur tenaga kerja.

Anggota DPD RI asal Bengkulu, Destita Khairilisani, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi dengan instansi terkait dalam isu PMI. Menurutnya, perlu ada kemudahan bagi calon pekerja yang ingin menjadi PMI. “Catatan kami, ke depan memang persyaratan PMI harus dipermudah,” harapnya.

Sementara itu, Michael Yudha Winarno dari IOM Indonesia menjelaskan bahwa keberadaan UU PPMI belum tersosialisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat desa. Akibatnya, UU ini kerap menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan daerah (perda). “UU ini masih menimbulkan tumpang tindih dengan perda, maka UU PPMI perlu dikaji lebih lanjut lagi,” katanya. (*)

Formasi Rekrutmen ASN Belum Cerminkan Kebutuhan Daerah

M. Fathoni

Penulis

Senator Penrad Siagian menyangsikan penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widayanti dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh dalam rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kamis (17/4/2025), yang menyatakan capaian tahapan penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) telah mencapai 100 persen.

“Saya salut dan bangga dengan Menteri PANRB dan Kepala BKN yang tidak jemu-jemu menyelesaikan tahapan-tahapan proses penerimaan CASN, baik PNS maupun PPPK, penuh waktu maupun paruh waktu. Tetapi saya ingin bertanya, 100 persen ini dalam pengertian apa?” tanya senator dari Sumatera Utara itu.

Menurut Penrad, capaian administratif tidak serta-merta mencerminkan terpenuhinya kebutuhan riil di daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Laporan capaian 100 persen yang disampaikan tidak menjelaskan



Anggota DPD RI Penrad Siagian. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

secara rinci apakah formasi yang dibuka benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Ia mengungkapkan fakta di Sumatera Utara yang menjadi daerah pemilihannya, hingga saat ini terdapat sekitar 1.856 sekolah negeri tingkat SD, SMP, dan SMA yang tidak memiliki guru agama Kristen. Kekosongan tersebut telah dilaporkan namun tidak mendapat respons dalam bentuk pembukaan formasi yang sesuai.

“Yang pertama, saya berulang kali menyebut bahwa dari capaian 100 persen itu, sekitar 65 persen sekolah negeri di Sumut tidak me-

iliki guru agama Kristen. Ini masih kita bicarakan di sektor pendidikan formal negeri, belum menyentuh sekolah swasta atau lembaga pendidikan lainnya,” jelasnya.

Situasi serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Ia mencontohkan kondisi di Pulau Nias, di mana di salah satu kabupaten kurang memiliki tenaga kesehatan di rumah sakit daerah (RSUD).

Puskesmas dan puskesmas pembantu umumnya tidak memiliki dokter. “Di empat kabupaten dan satu kota di Pulau Nias, fasilitas kesehatan sangat minim. Ada puskesmas tapi tidak ada dokter. Nah, 100 persen itu dalam konteks apa? Terpenuhinya kebutuhan atau apa?” tanyanya. (*)

DPD RI Gelar FGD Pra-APBN 2026 Serap Aspirasi Akademisi dan Daerah



Kegiatan FGD yang digelar Komite IV DPD RI, di Padang. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar *Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN Tahun 2026* di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025). Pada hari yang sama, juga dilakukan kegiatan serupa di Padang, Sumatera Barat. FGD di Semarang dihadiri Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap pandangan dan masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan di daerah, yang akan dijadikan DPD RI

sebagai rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memberikan pertimbangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026.

FGD ini memberikan ruang yang luas bagi pertukaran gagasan, termasuk tentang pentingnya digitalisasi pembangunan, penguatan UMKM, optimalisasi fiskal daerah, dan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal. Semua masukan akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi Komite IV DPD RI, yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun RKP dan RAPBN TA 2026.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, yang hadir dalam FGD di Semarang, menggarisbawahi sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh daerah, termasuk ketidaksesuaian antara program pusat dan kebutuhan riil di daerah, keterbatasan fiskal, rendahnya kualitas SDM, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif dan realistis.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, dalam FGD di Padang, menekankan bahwa RKP dan KEM-PPKF saling terkait erat dalam perencanaan pembangunan. RKP menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan, sedangkan KEM-PPKF mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.

“Sinergi antara kedua dokumen ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan dukungan fiskal yang memadai. Oleh karena itu, Komite IV memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan *FGD* untuk menampung pandangan dari akademisi dan pemerintah daerah,” kata Novita Anakotta. (*)

Susun Pertimbangan RAPBN 2026 Komite IV Hadirkan CELIOS dan IEI

Betria Eriani

Penulis

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan dua lembaga *think tank* nasional: Center of Economics and Law Studies (CELIOS) dan The Indonesia Economic Intelligence (IEI), bertempat di Ruang Rapat Mataram, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyebutkan RDPU tersebut dalam rangka menyusun pertimbangan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026. RDPU ini bertujuan untuk menyerap masukan berbasis data dan analisa dari CELIOS dan IEI guna memperkuat posisi DPD RI dalam fungsi pengawasan fiskal dan pengambilan kebijakan strategis.

Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif CELIOS Media Wahyudi Askar memaparkan tantangan struktural perekonomian Indonesia. Ia menekankan



Pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI bersama Direktur Eksekutif CELIOS Media Wahyudi Askar dan Chief Economist IEI Sunarsip, usai melakukan RDPU. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

kan bahwa tekanan global akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), penurunan daya beli masyarakat, serta penyusutan kelas menengah berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan pemodelan CELIOS, kebijakan tarif baru AS dapat menurunkan PDB Indonesia hingga -0,2 persen atau setara dengan Rp45 triliun. Media juga mengingatkan perlunya keberpihakan APBN terhadap rumah tangga, sektor riil, dan UMKM sebagai penopang utama perekonomian.

Sedangkan Chief Economist IEI Sunarsip memfokuskan pemaparan pada strategi kebijakan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebe-

sar 8 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, dengan membandingkan pengalaman India dan Tiongkok. Ia menekankan perlunya reformasi fiskal, penguatan tabungan domestik, serta peningkatan efisiensi belanja negara.

Kedua narasumber menyampaikan analisa kritisnya terhadap efektivitas program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan hilirisasi, serta tantangan relokasi investasi dari kebijakan tarif AS. Mereka mendorong agar program-program strategis pemerintah tidak hanya diarahkan pada pencapaian angka, tetapi juga keberlanjutan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. (*)

Komite III akan Kawal Kasus Kejahatan Seksual Anak di NTT

Rini Sumarni

Penulis

Dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Rabu (23/04/25), Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berjanji akan mengawal kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komite III Dailami Firdaus menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia. Ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Kasus terbaru melibatkan oknum polisi. “Kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum Kapolres Ngada NTT sangat memprihatinkan. Kami akan melakukan pengawalan atas proses hukumnya demi keadilan bagi anak,” kata Dailami Firdaus.

Dailami menyinggung masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia. Dengan jumlah anak yang begitu besar, banyak tantangan yang dihadapi dalam



Komite IV DPD RI saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian PPPA. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pembangunan perlindungan anak. Dia menyebutkan data 2024, diperkirakan 19,20 persen anak tidak bersekolah. Terkait pengasuhan anak, ada sekitar 1,69 persen anak usia dini yang tercatat tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandungnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni merasa miris terkait kasus LGBT anak yang kian marak di daerah pemilihannya. Di mana kasus ini sangat masif namun terjadi secara tersembunyi sehingga sulit dideteksinya. “Kasus LGBT yang korbannya anak sangat masif di Kaltim. Korbannya dibiayai hidup hedon, jadi orang tuanya positif *thinking*. Ini bahaya sekali,” ungkapnya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan bahwa

pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus kekerasan seksual eks Kapolres Ngada yang bergulir sejak 24 Februari 2025. Salah satunya adalah pemindahan korban untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan koordinasi antara berbagai pihak.

Tiga anak yang menjadi korban, masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, telah mendapat pendampingan psikososial yang diperlukan untuk mendukung proses pemulihan mereka. Kedua korban usia 16 dan 13 tahun saat ini telah dirujuk ke Rumah Harapan Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) untuk pendampingan psikososial dan agama setelah sebelumnya ditangani di *shelter* Kota Kupang. (*)

Penguatan Jaminan Sosial Nasional UU SJSN Harus Segera Direvisi

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Revisi ini dinilai penting guna mengatasi berbagai hambatan yang timbul akibat persoalan norma hukum dalam UU tersebut.

“UU SJSN sendiri telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja serta mendapatkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada substansi UU SJSN,” kata Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung DPD RI, Kamis (24/4/25).

Senator asal Papua Barat itu menyampaikan penyelenggaraan jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, telah diakui sebagai contoh oleh negara-negara ASEAN. Namun faktanya, masih terdapat kendala dalam implementasi jaminan sosial secara nasional, salah satunya aspek jaminan ketenagakerjaan yang belum mencapai target kepesertaan.

Komite III DPD RI juga telah menerima berbagai as-



Susana rapat dengar pendapat Komite III DPD RI dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**UU SJSN sendiri telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja serta mendapatkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada substansi UU SJSN.**”

**Ketua Komite III
DPD RI,
Filep Wamafma**

pirasi masyarakat yang menginginkan perluasan jangkauan jaminan sosial. Salah satunya adalah jaminan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja. “Tuntutan ini didorong oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Dampak kecelakaan lalu lintas sangat

signifikan di level keluarga, terutama jika menimpa anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi,” jelas Filep.

Pada kesempatan itu, anggota DJSN Unsur Organisasi Pemberi Kerja Paulus Agung Pambudhi menilai UU SJSN memang sudah waktunya dilakukan revisi. Menurutnya, ada beberapa perundang-undangan terbaru dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi UU SJSN dan UU BPJS.

“UU SJSN telah mengalami lima kali perubahan lewat dua kali judicial review, dan empat kali perubahan melalui UU Omnibus Sektor Keuangan, Cipta Kerja, Kesehatan, dan ASN. UU BPJS juga sama, telah mengalami tiga kali perubahan lewat peninjauan kembali. Maka ini adalah momentum untuk segera dilakukan revisi,” kata Paulus. (*)

DPD RI Dorong Percepat Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

Adhi Nugroho

Penulis

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membentuk Tim Kerja Akselerasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat yang diketuai oleh Senator Agustin Teras Narang. Tim ini berkomitmen untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat karena DPD RI telah memiliki RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang disahkan pada tahun 2018 lalu sebagai bahan awal.

Untuk menggenjot pembahasan RUU Masyarakat Adat tersebut, Tim Kerja Akselerasi DPD RI itu telah melakukan diskusi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan KEMITRAAN, Senin (28/4/2025). Diskusi tersebut digelar untuk mendapatkan masukan dari AMAN dan KEMITRAAN.

“DPD RI memandang penting hadirnya UU yang mengatur secara komprehensif pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, serta peran aktif masyarakat hukum adat dalam pembangunan nasional dan pembentukan kebijakan negara yang berkeadilan. Walaupun demikian, tentu perlu disadari bahwa proses yang ada tidaklah mudah dan



Tim Kerja Akselerasi RUU Masyarakat Hukum Adat bersama perwakilan dari AMAN dan KEMITRAAN. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

banyak tantangan yang harus dihadapi,” kata Teras Narang dalam diskusi tersebut.

Rukka Sombolinggi dari AMAN menyampaikan bahwa keberadaan RUU ini sangat krusial mengingat selama ini tidak adanya payung hukum yang sah menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Sejumlah konflik agraria di wilayah adat, yang dalam satu dekade terakhir tercatat mencapai 678 kasus dengan dampak kehilangan wilayah adat seluas 11,07 juta hektar, menunjukkan pentingnya kehadiran negara melalui regulasi yang tegas dan adil.

Moch Yasir Sani dari KEMITRAAN mengatakan bahwa selama lebih dari tiga dekade, pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat

terus berputar-putar di DPR dan pemerintah tanpa kejelasan pengesahan. Dia menilai RUU ini bukan hanya berbicara tentang masa lalu atau kondisi saat ini, tetapi harus mampu merancang masa depan masyarakat adat yang adaptif terhadap perubahan zaman, memperhatikan aspek inklusivitas seperti peran perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak dalam komunitas adat.

Baik AMAN maupun KEMITRAAN berharap RUU Masyarakat Hukum Adat ini dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2025, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat di seluruh nusantara. (*)

Darwati A. Gani

Betria Eriani

Penulis

Darwati A. Gani adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang mewakili Provinsi Aceh. Ia lahir pada 7 September 1972 dan dikenal sebagai figur perempuan Aceh yang konsisten memperjuangkan kepentingan daerahnya di tingkat nasional. Sebelumnya, Darwati menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2014–2017 dan 2019–2024. Salah satu alasan Darwati maju sebagai senator karena ingin meneruskan perjuangannya saat menjadi politikus partai lokal di Aceh

Darwati yang pernah menjadi Ketua TP PKK Provinsi Aceh itu, memahami

secara langsung kompleksitas sosial, budaya, dan politik yang dihadapi masyarakat Aceh. Kepedulianya tumbuh dari kedekatannya dengan akar kehidupan rakyat.

Pendidikan menjadi fondasi penting dalam kiprah Darwati. Ia menyelesaikan studi sarjana di bidang ilmu sosial di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dan kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri dengan fokus pada kebijakan publik dan ekonomi. Pengetahuan yang luas ini memperkuat kapasitasnya dalam merumuskan dan memperjuangkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya.

Sebelum terjun ke politik nasional, Darwati aktif dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Ia dikenal karena perannya dalam pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta advokasi terhadap isu kesehatan masyarakat. Salah satu perhatian utamanya adalah peningkatan kasus HIV/AIDS di Aceh, yang mendorongnya untuk memprakarsai kolaborasi lintas sektor—termasuk dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan—untuk penanganan yang berbasis budaya dan agama.

Di DPD RI, Darwati memfokuskan perjuangannya pada peningkat-

an kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Ia mendorong optimalisasi potensi daerah di bidang pertanian, kelautan, dan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam berbagai forum nasional, ia konsisten menyuarakan pentingnya keadilan anggaran dan perhatian kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang masih tertinggal, termasuk Aceh.

Darwati juga pernah dikenal sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Provinsi Aceh, posisi yang memperkuat pengaruh dan keteladanannya dalam membangun kepemimpinan berbasis nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Ia meyakini bahwa kemajuan Aceh tidak bisa dicapai tanpa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, ia mendorong dialog yang konstruktif di berbagai lapisan masyarakat.

Menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas, dan kemanusiaan, Darwati A. Gani terus berkomitmen dalam perjuangan politik yang berpihak pada rakyat. Ia menjadi contoh pemimpin perempuan yang tangguh, konsisten, dan visioner, serta memainkan peran penting dalam pembangunan Aceh yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. (*/berbagai sumber)



(Foto Waspada Aceh)

Cherish Harriette Mokoagow

Arso P Nugroho

Penulis

Cherish Harriette Mokoagow adalah sosok muda yang menonjol dalam kancah politik Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Lahir pada 14 September 1995, ia dikenal sebagai representasi generasi milenial yang berhasil menembus parlemen nasional melalui jalur independen sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pada Pemilu 2019, Cherish meraih 180.224 suara, menjadikannya peraih suara terbanyak di Dapil Sulut, mengungguli politisi senior lainnya.

Sebelum terjun ke dunia politik, Cherish meniti karier sebagai jurnalis, termasuk menjadi reporter di CNN Indonesia. Latar belakang ini memberinya kepekaan terhadap isu-isu sosial dan kemampuan komunikasi yang kuat. Pendidikan formalnya pun impresif; ia meraih gelar Bachelor of Arts in Mass Communication dari Northumbria University, Newcastle, dan gelar Master of Business Administration dari Coventry University, London.

Sebagai senator, Cherish dikenal gigih memperjuangkan pemekaran

Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR), sebuah aspirasi lama masyarakat di wilayah tersebut. Ia bahkan berhasil membawa Ketua DPD RI Kelima AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, beserta jajaran ke Bolmong untuk mendukung keputusan pemekaran. Komitmennya terhadap isu ini menjadikannya simbol harapan bagi warga BMR.

Dalam Pemilu 2024, Cherish kembali mencalonkan diri dan berhasil mempertahankan dukungan signifikan, dengan perolehan suara sementara mencapai 158.289, menempatkannya di posisi kedua setelah Maya Rumantir. Keberhasilannya ini menunjukkan konsistensi dan kepercayaan publik terhadap kiprahnya sebagai wakil daerah.

Selain kiprah politiknya, Cherish juga dikenal karena keterbukaannya dalam melaporkan kekayaan. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2023, total kekayaannya tercatat sebesar

Rp 21,7 miliar, yang sebagian besar berupa aset tanah dan bangunan di berbagai lokasi, termasuk Jakarta Selatan dan Bolaang Mongondow.

Cherish Harriette Mokoagow merupakan contoh nyata bagaimana generasi muda dapat berperan aktif dan signifikan dalam politik nasional. Dengan latar belakang yang kuat, dedikasi terhadap konstituen, dan komitmen terhadap transparansi, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya kaum muda yang ingin berkontribusi bagi bangsa dan daerahnya. (*/berbagai sumber)



Tari Saman: Warisan Gerak dari Tanah Gayo

Adhi Nugroho

Penulis

Di tengah hijaunya perbukitan Gayo, Aceh Tenggara, lahirlah sebuah tarian yang tak hanya memesona secara visual, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang mendalam: Tari Saman. Tarian ini tumbuh dari tradisi dakwah Islam yang disebarkan oleh Syekh Saman, seorang ulama dari Gayo Lues pada abad ke-17. Syekh Saman menciptakan tarian ini sebagai media penyampaian ajaran agama dan moral melalui syair-syair pujian kepada Allah, yang disampaikan dalam bahasa Gayo dan Arab. Seiring waktu, Tari Saman menjadi ekspresi budaya masyarakat Gayo yang menyatukan unsur keagamaan, kesenian, dan kebersamaan.

Tari Saman memiliki ciri khas yang sangat kuat: formasi duduk berjajar rapat, gerakan tangan yang cepat, dan irama yang padu antara syair, tepuk tangan, dan hentakan dada. Keindahan tari ini tidak hanya terletak pada koreografinya, tetapi juga pada kekompakan dan keselarasan antarpeneri. Setiap gerakan menuntut konsentrasi tinggi dan kerjasama yang solid. Inilah sebabnya Tari Saman sering dianggap sebagai simbol harmoni dan kekuatan kolektif masyarakat Gayo.

Pada awalnya, Tari Saman hanya ditampilkan dalam



Tari saman (Foto Kps Reg)

acara-acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi atau tradisi kenduri. Namun seiring dengan perubahan zaman dan meningkatnya minat terhadap kebudayaan daerah, Tari Saman mulai tampil dalam berbagai festival dan even nasional maupun internasional. Pemerintah daerah dan masyarakat Gayo turut mendorong pelestariannya dengan membentuk sanggar-sanggar tari dan mengajarkannya sejak usia dini di sekolah-sekolah.

Pengakuan dunia terhadap Tari Saman datang pada tahun 2011, ketika UNESCO menetapkannya sebagai *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Pengakuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai lokal yang terkandung dalam tradisi tersebut. Tari Saman kini bukan hanya milik masyarakat Gayo, tetapi sudah menjadi bagian dari

identitas budaya bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam perkembangannya, Tari Saman juga mengalami inovasi, terutama dalam hal koreografi dan jumlah peneri. Dulu, jumlah peneri biasanya ganjil dan berkisar antara 11 hingga 17 orang. Kini, pertunjukan Tari Saman bisa melibatkan puluhan hingga ratusan peneri, seperti yang sering ditampilkan dalam ajang pemecahan rekor. Meskipun begitu, esensi gerak dan nilai kekompakan tetap dijaga, menunjukkan bahwa tradisi bisa tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya.

Lebih dari sekadar tarian, Saman adalah warisan nilai—tentang kebersamaan, kedisiplinan, dan spiritualitas. Di tengah arus modernisasi, Tari Saman terus bergema, bukan hanya sebagai pertunjukan seni, tetapi juga sebagai pengingat akan akar budaya dan kekuatan tradisi yang mampu menyatuk. (*/berbagai sumber)

Saman Dance: A Heritage of Choreography from the Land of Gayo

Adhi Nugroho

Writer

Amidst the lush green hills of Gayo, Southeast Aceh, a mesmerizing dance was born which is not only visually captivating but also deeply rooted in cultural values: the Saman Dance. This dance emerged from the Islamic preaching tradition spread by Sheikh Saman, a cleric from Gayo Lues in the 17th century. Sheikh Saman created this dance as a medium to convey religious teachings and moral values through ode to Allah, expressed in both Gayo and Arabic languages.

Through the course of time, Saman Dance turned to be a cultural expression of the Gayo people, blending religious, artistic, and communal elements. It is known for its distinctive characteristics: a rapid seated formation, quick hand movements, and harmonized rhythm of the ode, clapping, and chest-thumping. Its beauty lies not only in the choreography but also in the synchronization and harmony among the dancers. Each motion requires intense focus and solid teamwork. This is why Saman Dance is often regarded as a symbol of harmony and collective strength of Gayo society.

Originally, Saman Dance was performed during religious events such as the celebration



Saman Dance. (Indonesia Kaya Photo)

of the Prophet Muhammad's birthday or traditional feasts. However, with the changing times and growing interest in regional culture, the dance has begun to be performed in various festivals and national and international events. Local governments and the Gayo community have actively promoted its preservation by establishing dance studios and teaching it to children from an early age in schools.

Global recognition of Saman Dance came in 2011, when UNESCO inscribed it on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The acknowledgment does not only make proud but also reinforces the importance of preserving the local values embodied in this tradition. Today, Saman Dance is not just a heritage of the Gayo people but has transformed as a part of Indonesia's cultural

identity on the world stage.

In its development, Saman Dance has also undergone innovation, particularly in its choreography and the number of dancers. In the past, it was performed by odd number of dancers, usually about 11 to 17. Today, Saman can involve dozens up to hundreds of dancers, as frequently performed during record-breaking events. Nevertheless, the essence of choreography and the value of unity remain intact, proving that tradition can evolve without losing its core identity.

More than just a dance, Saman is a legacy of values—of togetherness, discipline, and spirituality. In the midst of modernization, Saman Dance continues to echo, not only as a performance art but also as a reminder of cultural roots and the enduringly unifying power of tradition. (* / various sources)

Menyusuri Keheningan dan Keindahan Coban Rais

Lela Sadiyah

Penulis

Tersembunyi di balik lebatnya hutan pinus di lereng Gunung Panderman, Coban Rais menawarkan pengalaman yang berbeda dari wisata mainstream di Kota Batu. Air terjun setinggi 75 meter ini tidak hanya menyajikan keindahan alam yang asri, tetapi juga membawa pengunjung masuk ke dunia yang sunyi dan damai—jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Dulu dikenal dengan nama Coban Sabrangan karena pengunjung harus menyeberangi sungai untuk mencapainya, kini kawasan ini makin tertata rapi, meski tetap mempertahankan nuansa alaminya.

Perjalanan menuju Coban Rais memang membutuhkan sedikit usaha. Dari area parkir, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer melewati jalan setapak berbatu dan tanah merah yang terkadang licin. Tapi justru di situlah letak pesonanya: setiap langkah seperti menyingkap lapisan-lapisan ketenangan. Semakin mendekati air terjun, suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian mulai terdengar, menyatu dengan suara dedaunan dan kicau burung.

Namun, Coban Rais bukan sekadar air terjun. Di kawasan yang sama, terdapat Bukit Batu Flower Garden—destinasi yang kini mulai naik daun di kalangan pemburu foto Instagram. Di sini, pengunjung bisa menemukan berbagai spot foto kreatif seperti ayunan langit, papan cinta berbentuk hati, hingga gardu pandang yang menjorok ke arah hutan. Di musim bunga, tempat ini berubah menjadi lautan warna yang memesona, memberi nuansa romantis yang sulit dicari di tempat lain.

Berbeda dari kebanyakan destinasi wisata alam, Bukit Batu tidak menawarkan suara bising dan wahana penuh teriakan. Yang ditawarkan adalah momen-momen kontemplatif: ketika duduk di gardu pandang, memandangi hamparan hijau yang tak berujung, ditemani sejuknya angin pegunungan. Di sini, waktu



Coban Rais, Malang (Foto Jelajahnesia)

seolah melambat. Cocok bagi mereka yang lelah dengan rutinitas dan ingin menyegarkan pikiran dengan cara yang sederhana, namun membekas.

Meski terbilang “tersembunyi”, Coban Rais dan Bukit Batu bukanlah destinasi yang tertutup. Akses jalan sudah cukup baik dan fasilitas dasar seperti toilet, musala, hingga warung-warung kecil telah tersedia. Pemerintah dan pengelola lokal menjaga kawasan ini agar tetap lestari dengan memberlakukan aturan tertentu, termasuk pelarangan membuang sampah sembarangan. Ada semangat kuat untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan pelestarian lingkungan.

Bagi yang menginginkan pengalaman liburan yang tenang namun tetap meninggalkan kesan mendalam, Coban Rais dan Bukit Batu Flower Garden adalah jawabannya. Ia bukan hanya sekadar tempat untuk dikunjungi, tetapi ruang untuk merenung, menghirup udara bersih, dan merasa lebih dekat dengan alam. Di kota yang dikenal sebagai “Swiss-nya Jawa Timur”, destinasi tersembunyi ini adalah permata yang masih dijaga baik oleh alam dan manusianya. (*/berbagai sumber)

Tracing the Tranquility and Scenic View of Coban Rais

Lela Sadiyah

Writer

Hidden behind dense pine forests on the slopes of Mount Panderman, Coban Rais offers a different kind of experience from the mainstream tourism of Batu City. This 75-meter-high waterfall does not only showcase pristine natural beauty but also invites visitors into a peaceful and serene world—far from the hustle and bustle of the city. Formerly known as Coban Sa-brangan, because visitors had to cross a river to reach it, the area is now more neatly arranged while still maintaining its natural charm.

The journey to Coban Rais requires a bit of effort. From the parking area, visitors must walk around 1.5 kilometers along a rocky footpath and a slippery reddish soil. But therein lies its allure: every step feels like revealing layers of serenity. Approaching the waterfall, the roaring sound of the waterfall begins to be heard, blending harmoniously with the sound of rustling leaves chirping birds.

Nevertheless, Coban Rais is more than just a waterfall. Within the same area lies Bukit Bulu Batu Flower Garden—a destination that has earned popular-



Coban Rais, Batu. (Pikiran Rakyat Photo)

ity among Instagram photo hunters. Here can visitors find various creative photo spots such as the sky swing, heart-shaped love board, and viewing hut zooming deep into the forest. During the blooming season, the place transforms into a sea of vibrant colors, offering a romantic ambient hard to find elsewhere.

Unlike many other nature destinations, Bukit Bulu doesn't produce loud noises or screaming riders. Instead, it provides contemplative moments: sitting on the viewing hut, gazing at the endless green horizon, accompanied by cool mountain breeze. Time seems to slow down here—perfect for those weary of daily routines and in need to refresh their mind in a simple yet meaningful way.

Although considered a “hidden gem,” Coban Rais

and Bukit Bulu are not entirely off the grid. The access roads are decent, and basic facilities such as restrooms, praying room, and small food stalls are available. The local government and community jointly preserve the area by implementing certain rules, including a strict no-littering rule. There's a strong determination to keep the balance between tourism and environmental conservation.

For those seeking a peaceful yet memorable holiday experience, Coban Rais and Bukit Bulu Batu Flower Garden are the perfect answers. They are not merely a destination to visit, but a place to contemplate, breathe in clean air, and get closer to nature. In a city often dubbed the “Switzerland of East Java,” this hidden destination remains a well-preserved gem by both nature and its people. (*various sources)

Menari di Ketinggian: Pesona Abadi Air Terjun Sipiso-piso



Air terjun Sipiso-Piso, Sumatera Utara. (Foto TribrataNews)

Helena AF Ojan

Penulis

Dari balik kabut pagi di Tanah Karo, Sumatera Utara, gemuruh itu terdengar sebelum terlihat. Air Terjun Sipiso-piso, setinggi sekitar 120 meter, mengalir deras dari celah tebing curam yang menghadap ke Danau Toba. Dikenal sebagai salah satu air terjun tertinggi dan paling ikonik di Indonesia, Sipiso-piso bukan sekadar pemandangan alam; ia adalah simbol kekuatan, ketenangan, dan keelokan yang sulit dilupakan oleh siapa pun yang datang.

Letaknya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, menjadikan Sipiso-piso mudah diakses namun tetap menyimpan aura eksotis. Dari tempat parkir, pengunjung disuguhi pemandangan Danau

Toba yang tenang membentang jauh di bawah, dengan air terjun menjulang di antara rimbunnya pepohonan. Jalur menurun menuju dasar air terjun cukup menantang: lebih dari 600 anak tangga batu harus dituruni, namun setiap langkah terbayar lunas oleh keindahan yang tersaji di hadapan.

Air Terjun Sipiso-piso muncul dari gua kecil di ujung tebing yang tampak seperti lubang rahasia di perut bumi. Air yang jatuh bebas menciptakan kabut halus dan pelangi kecil di bawah cahaya matahari. Suasananya mistis dan megah, dikelilingi suara alam yang murni—gemericik air, tupan angin, dan suara serangga hutan yang menyatu dalam harmoni.

Di sekitar kawasan air terjun, penduduk lokal menjajakan kerajinan tangan khas

Karo serta buah-buahan segar dari ladang sekitar. Pengunjung juga bisa menikmati aneka makanan tradisional sambil duduk di warung-warung kecil yang menghadap panorama Danau Toba. Suasana ini membuat perjalanan ke Sipiso-piso tak hanya menjadi wisata visual, tapi juga pengalaman budaya yang hangat dan otentik.

Sipiso-piso juga kerap dijadikan titik awal perjalanan spiritual oleh sebagian pengunjung. Entah karena aura magis dari air terjun yang menjulang, atau karena ketenangan Danau Toba yang seolah memanggil untuk merenung, tempat ini sering menjadi ruang kontemplasi bagi mereka yang mencari keheningan. Di musim hujan, debit air meningkat drastis dan menambah dramatis pemandangan, seolah Sipiso-piso sedang menari dalam kemegahannya.

Bagi pencinta alam, fotografer, maupun pelancong yang mendambakan perpaduan keagungan dan kedamaian, Air Terjun Sipiso-piso adalah destinasi yang tak boleh dilewatkan. Di tengah dinginnya udara pegunungan Karo, air terjun ini menyuguhkan kehangatan emosional yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah berdiri memandangnya—diam-diam jatuh cinta, dan ingin kembali lagi. (*/berbagai sumber)

Dancing in Heights: The Timeless Charm of Sipiso-piso Waterfall



Air terjun Sipiso-Piso, Sumut (Pariwisata Sumut Photo)

Helena AF Ojan

Writer

Behind the morning mist in Tanah Karo, North Sumatra, the roar is heard before it's seen. Sipiso-piso Waterfall, about 120 meters high, flowing fast from a steep cliff facing Lake Toba. Known as one of the highest and most iconic waterfalls in Indonesia, Sipiso-piso is more than just a natural view; it is a symbol of strength, tranquility, and scenic view that is unforgettable to anyone who visits.

Located in Tongging Village, Merek District, Karo Regency, Sipiso-piso is easily accessible while still retains its exotic aura. From the parking area, visitors are greeted with a stun-

ning view of the calm Lake Toba stretching far below, with the waterfall mounting within dense trees. The descent to the waterfall base is quite challenging: more than 600 stone steps must be descended, yet every step is well-compensated by unfolding beauty before the very eyes.

Sipiso-piso Waterfall emerges from a small cave at the edge of the cliff, resembling a secret hole in the belly of the earth. The water falling freely creates a fine mist and a tiny rainbow under the sunlight. The atmosphere is mystical and majestic, surrounded by genuine sounds of nature—the trickling water, the breeze, and the forest insect sound, all blending in harmony.

Around the waterfall

area, the local sell traditional Karo handicrafts and fresh fruits from the surrounding grove. Visitors can also enjoy various traditional foods while sitting at small stalls facing the panorama of Lake Toba. It does not only make the trip to Sipiso-piso a visual visit but also an authentic and warm cultural experience.

Sipiso-piso is also often used as a spiritual starting point by some visitors. Whether it's the mystify aura of the tall waterfall or the tranquillity of Lake Toba enticing for meditation, the place often becomes a spot for contemplation to those who are seeking solace. During rainy season, the water flow increases drastically, adding to the dramatic scene, featuring as if Sipiso-piso were dancing within its grandeur.

For nature lovers, photographers, or travellers seeking a mixture of magnificence and peace, Sipiso-piso Waterfall is a must-visit destination. Amidst the cold of Karo mountain-range, the waterfall offers an emotional warmth perceivable only to those who have stared before it—secretly falling in love and longing to return. (*various sources)

Semangkok yang Tak Pernah Berubah: Legenda Hangat dari Cianjur



(Foto pergikulinier)

Nanda Russia Rola

Penulis

Ah, bubur Cianjur satu suapan, dan kau tahu ini bukan bubur biasa. Ini bukan cuma soal sarapan, ini tentang warisan rasa, tentang pagi yang tak tergantikan, tentang semangkok hangat yang mampu mengusir dingin kota. Melegenda bukan karena hype, tapi karena konsistensi; dari generasi ke generasi, rasa itu tetap setia di lidah dan hati para penikmatnya.

Di setiap sendoknya, bubur Cianjur menyimpan filosofi kehangatan: teksturnya lembut tapi gak loyo, gurihnya nggak nyebel, dan sentuhan asin-manis dari suwiran ayam kampung, cakwe renyah, dan sambal dadakan jadi

paket komplrit rasa yang jujur. Tak lupa, kuah kuning hangat dan koya bawang yang menyelinap di sela-sela membuat tiap suapan terasa seperti pelukan nenek hangat, tulus, dan penuh kenangan.

Bukan cuma rasa yang bikin bubur ini melegenda, tapi juga atmosfernya. Warung-warung bubur Cianjur seringkali sederhana, tanpa gimmick, tapi selalu penuh. Bangku plastik, aroma kaldu, dan suara sendok bersahutan jadi simfoni pagi yang menenangkan. Di sana, yang datang bukan sekadar lapar, tapi mencari rasa nyaman yang gak bisa dibeli dari dapur-dapur instan masa kini.

Legenda bubur Cianjur juga hidup dari cerita-cerita orang. Katanya, bubur

ini lebih enak kalau dimakan langsung di tempat karena katanya, semangkok bubur ini menyerap energi kota. Entah benar atau tidak, tapi anehnya selalu terasa beda saat dibungkus. Mungkin karena rasa juga datang dari suasana, dari interaksi sederhana antara pembeli dan penjual yang saling sapa dengan hangat.

Kalau kau tanya orang-orang tua di Cianjur, mereka akan bilang bubur ini bukan cuma makanan ia bagian dari sejarah lokal. Dari zaman pasca-kemerdekaan hingga era TikTok sekarang, bubur ini tetap eksis, tetap relevan, tanpa perlu rebranding atau influencer. Karena ketika rasa sudah jujur dari awal, ia nggak butuh validasi digital.

Dan begitulah bubur Cianjur, tetap berdiri di tengah perubahan zaman. Melegenda bukan karena keajaiban, tapi karena keaslian. Ia tidak pernah memaksa untuk dikenang, tapi selalu berhasil ditulis dalam ingatan siapa pun yang pernah menyeruput sarinya. Kadang, yang legendaris itu bukan yang heboh, tapi yang diam-diam tumbuh bersama hidup kita semangkok demi semangkok. (*)

A Bowl That Never Changes: The Legend of Warmth from Cianjur

Nanda Russia Rola

Written

Slurp.. Just one spoonful of Cianjur porridge, you will know this isn't your average porridge. This isn't just breakfast, it's a legacy of taste, a sacred morning ritual, a warm bowl that chases away the chill of the city. It didn't become a legend because of hype, but because of consistency; from generation to generation, the taste has remained loyal to both tongue and soul.

In every spoon, Cianjur porridge holds the philosophy of comfort: the texture is soft but never soggy, the savouriness never overwhelming, and the mix of shredded chicken, crispy cakwe, and freshly made sambal makes a complete genuine taste. And don't forget the warm yellow broth and fried garlic crumbs sneaking into each bite it's like being hugged by your grandma: warm, sincere, and rich with memories.

It's not just the taste that made this porridge legendary, but also the atmosphere. Cianjur porridge stalls are often simple, with no flashy gimmicks, yet always packed with people. The plastic stools,



(Foto pergikuliner)

the aroma of broth, and the clatter of spoons create a soothing morning symphony. People come not just because they're hungry, but because they crave the comfort that can't be found in any today's instant kitchens.

The legend of Cianjur porridge also lives through the narratives of others. Some say it tastes better when eaten right on the spot because the bowl somehow absorbs the city's energy. Whether that's true or not, it is different when it is taken to-go. Maybe it is not just about the taste, but about the atmosphere of a humble interaction between buyer and vendor that warms the soul.

If you ask the elders in

Cianjur, they will tell you that this porridge isn't just food. It is a part of local history. From post-independence days to the TikTok era, this porridge has stayed relevant without needing rebranding of any influencers. Their genuine taste from the start doesn't need any digital validation.

And so stands Cianjur porridge, unshaken by time. A legend not built on hype, but on authenticity. It never demands to be remembered, yet always ends up carved in the memories of those who have sipped its warmth. Sometimes, the real legends are not loud, they grow quietly with our lives bit by bit. (*)

Rica-Rica Ayam: Ledakan Rasa dari Jantung Kuliner Manado



Rica-rica Ayam Manado (Foto IDN Times)

Lela Sadiyah

Penulis

Di antara sekian banyak kekayaan kuliner Sulawesi Utara, Rica-Rica Ayam menjadi salah satu yang paling diburu oleh pecinta makanan pedas. Hidangan ini bukan sekadar makanan, melainkan cerminan karakter masyarakat Manado yang hangat, berani, dan ekspresif dalam soal cita rasa. Nama “rica-rica” berasal dari bahasa Manado yang berarti “pedas” atau “cabai”, dan sesuai namanya, sajian ini memang menyajikan sensasi pedas yang menggigit namun nikmat.

Rica-Rica Ayam dibuat dari potongan ayam yang dimasak bersama campuran cabai merah, bawang merah,

bawang putih, jahe, daun jeruk, dan serai. Semua bumbu ditumis hingga harum, lalu ayam dimasukkan dan dimasak hingga bumbu meresap sempurna. Sekilas terlihat sederhana, tapi kombinasi rasa pedas, asam, gurih, dan aroma rempah menjadikan rica-rica sebagai sajian yang kaya rasa dan menggoda selera.

Yang membuat kuliner ini semakin istimewa adalah fleksibilitasnya. Di Manado, rica-rica tidak hanya dibuat dari ayam, tetapi juga dari daging sapi, ikan, bahkan daging eksotis seperti paniki (kelelawar buah) dan tikus hutan, meski yang terakhir tentu tidak untuk semua orang. Namun, Rica-Rica Ayam tetap menjadi favorit karena kelezatannya yang aman dan bisa dinikmati oleh siapa saja,

termasuk wisatawan.

Bagi masyarakat Manado, rica-rica bukan hanya menu harian, tetapi juga sering hadir di berbagai perayaan, mulai dari acara keluarga hingga hajatan besar. Menyantap rica-rica terasa belum lengkap tanpa nasi putih panas, sambal dabu-dabu, dan sayur bunga pepaya yang khas. Kombinasi ini menjadi paket lengkap yang mencerminkan keberanian rasa khas Sulawesi Utara.

Kini, Rica-Rica Ayam tidak hanya tersedia di rumah makan tradisional, tetapi juga merambah ke restoran modern dan hotel-hotel berbintang di Manado. Wisatawan dari berbagai daerah bahkan menyempatkan diri berburu kuliner ini sebagai bagian dari pengalaman wisata mereka. Tak jarang, kepedasan rica-rica menjadi cerita tersendiri yang dibawa pulang setelah berkunjung ke Manado.

Lebih dari sekadar makanan, Rica-Rica Ayam telah menjadi ikon kuliner Manado yang mempertemukan warisan budaya dan selera modern. Ia mengajarkan bahwa keberanian dalam memasak, seperti dalam hidup, mampu menghasilkan sesuatu yang berkesan dan menggugah. Dan bagi siapa pun yang mencicipinya, rica-rica bukan hanya membakar lidah, tapi juga meninggalkan kenangan mendalam akan kelezatan khas bumi Nyiur Melambai. (*/berbagai sumber)

Rica-Rica Chicken: The Burst of Taste from the Heart of Manado Cuisine



Chicken Rica-Rica, Manado (Foto DetikTravel)

Lela Sadiyah

Written

Among the many culinary treasures of North Sulawesi, Rica-Rica Chicken stands out as one of the most sought-after dishes by spicy food lovers. This dish is more than just a meal—it reflects the character of the Manado people: warm, bold, and expressive in taste. The term “rica-rica” comes from the Manado language, meaning “spicy” or “chili”, and true to its name, this dish offers a fiery yet delicious sensation.

Rica-Rica Chicken is made with chicken pieces cooked in a blend of red chili, shallots, garlic, ginger, kaffir lime leaves, and lemongrass. The spices

are sautéed until fragrant, then the chicken is added and simmered until the flavors deeply infuse the meat. It may seem simple, but the combination of spicy, tangy, savory flavors and aromatic herbs creates a dish rich in taste and hard to resist.

What makes this dish even more special is its versatility. In Manado, rica-rica is not only made with chicken, but also with beef, fish, and even exotic meats like paniki (fruit bat) and forest rat—though the latter is definitely not for everyone. Still, Rica-Rica Chicken remains the top choice, loved for its deliciousness and accessibility to a wider audience, including tourists.

For the people of Manado, rica-rica is not

just a daily dish, but also a staple at family gatherings and festive occasions. It is best enjoyed with hot steamed rice, dabu-dabu (a type of chili relish), and stir-fried papaya flowers—a distinctive local combination. This trio forms a complete culinary experience that embodies the bold flavors of North Sulawesi.

Today, Rica-Rica Chicken is not only found in traditional eateries but has also made its way into modern restaurants and upscale hotels across Manado. Visitors from all over often make it a point to try this signature dish as part of their travel experience. For many, the spiciness of rica-rica becomes a memorable story to share long after their trip.

More than just a dish, Rica-Rica Chicken has become a culinary icon of Manado that connects cultural heritage with modern tastes. It shows that boldness in cooking—like in life—can result in something truly unforgettable. And for anyone who gets a taste, rica-rica doesn't just ignite the palate, but also leaves a lasting memory of the flavors of Nyiur Melambai, the land of waving coconut palms. (*/various sources)

MASIH ADAKAH OTONOMI DAERAH?

Oleh:

Djohermansyah Djohan/Guru Besar IPDN, Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014),
Presiden Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)

Tanggal 25 April ini kita memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-29. Pemerintah memusatkan perayaannya di Balikpapan dengan inspektur upacara Arya Bima, Wakil Menteri Dalam Negeri. Tapi, sebenarnya yang penting bukanlah seremoninya, melainkan evaluasinya. Bagaimana kondisi otonomi daerah kini, apakah tambah maju, jalan di tempat, atau bahkan mundur?

Dari berbagai fenomena pemerintahan yang terjadi selama seperempat abad ini, tampak otonomi daerah yang diamanahkan oleh gerakan reformasi 1998 tidak baik-baik saja kondisinya. Cenderung mundur. Timbul re-sentralisasi dan de-otonomisasi. Terjadi penarikan berbagai kewenangan sektoral oleh pemerintah pusat, antara lain di bidang kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, perumahan, dan aneka perizinan. Padahal kewenangan itu adalah rohnya otonomi daerah. Tanpa wewenang yang cukup, pemda tidak dapat mengurus kepentingan masyarakat dengan baik, melaksanakan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan.

Aktor pemerintahan kita di pusat agaknya kurang ikhlas melepas kewenangan



kepada daerah. Tentu ada alasannya. Salah satunya adalah karena pemda tak mengurus kewenangan itu dengan baik. Menyalahgunakan perizinan kehutanan dan pertambangan misalnya, sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan. Jual beli perizinan ini terjadi gara-gara kepala daerah perlu modal untuk maju pilkada.

Selain itu, di bidang keuangan daerah, timbul pula ketidakadilan fiskal dan makin ketatnya pengendalian pusat. Daerah “*by law*” ditugaskan mengurus 32 urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, namun dana transfer ke daerah (546 daerah otonom) hanya sekitar sepertiga dari APBN. Padahal jumlah ASN yang bekerja di pemda hampir mencapai 80% dari total ASN kita. Di banyak negara, praktiknya separuh lebih “state budget” dialokasikan

kepada daerah otonomnya. Di negara kita tak terjadi, karena anggaran besar diperlukan guna membiayai birokrasi pusat yang gemuk.

Uang daerah dari transfer pusat yang terbatas itu memang bisa ditambah dengan menggali PAD (pendapatan asli daerah). Sayangnya, hanya daerah kaya yang bisa punya PAD tinggi, seperti DKI Jakarta, Kabupaten Badung di Bali, dan Kota Tangerang Selatan di Banten. Banyak daerah PAD-nya pas-pasan, untuk membiayai anggota DPRD saja sudah habis. Jangan heran kalau banyak daerah kita jalannya pada rusak, sekolah ambruk, dan jembatan gantung di desa saja tak terbangun, gara-gara uangnya sudah tak ada. Visi dan misi yang dijanjikan kepala daerah waktu kampanye tak terdukung oleh APBD yang ada.

Di tengah-tengah kempesnya duit daerah, celaknya pemerintah pusat selalu minta daerah mendukung untuk membantu mengongkosi program-programnya, misalnya yang paling anyar “koperasi desa merah putih”. Bahkan, pembangunan fisik kantor instansi pusat tak segan-segan diminta daerah membangunkannya. Kepala daerah jadi “mumet” kepalanya. Dibantu susah, tak dibantu susah.

Terkait pengendalian, dana transfer ke daerah yang relatif tak mencukupi itu, dipatok pula oleh pusat penggunaannya. Maka, dana DAU (block grant), sekarang rasa DAK (*specific grant*). Semua penggunaannya harus sesuai petunjuk pusat. Begitu pula penatausahaan keuangan daerah diseragamkan lewat SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang kaku dan dikelola pusat.

Dalam bidang kepegawaian, pusat tidak saja mengelola penerimaan ASN, tapi kini juga sedang dibuat aturan lewat revisi UU ASN, semua pejabat eselon I dan II di daerah-daerah mutasinya menjadi kewenangan pusat, tidak lagi di tangan kepala daerah.

Artinya, pejabat pembina kepegawaian bukan lagi kepala daerah, tapi langsung presiden.

Menyangkut pembuatan produk hukum daerah (perda dan perkada), daerah-daerah tidak mandiri dalam menyusunnya, karena harus berkonsultasi dan perda-perda terkait pajak dan retribusi mesti dengan persetujuan pusat. Akibatnya, waktu pembuatan bisa menjadi lama dan ongkos konsultasi

daerah ke pusat pun cukup besar.

Begitulah kondisi otonomi daerah kita kini yang kian merana. Makin sentralistik. Keadaan itu diperparah oleh mayoritas aktor pemerintahan lokal kita yang tak

administrasi. Untuk ini obatnya memang hanya lewat perbaikan sistem pilkada. Jangan lagi seragam, tapi asimetrik. Ada yang langsung, tak langsung, dan diangkat saja. Begitu pula wakil, ada daerah yang wakil kepala daerahnya tiga, dua, satu, dan nol. Mereka tak dipilih berpasangan tapi diangkat saja oleh kepala daerah terpilih (sistem mono-eksekutif).

Pada hari ulang tahun otonomi daerah ini, seiring dengan naiknya pemerintahan baru Presiden Prabowo, mendesak dilakukan revisi UU Pemda No. 23 Tahun 2014 yang sudah berusia satu dasawarsa lebih. Hal-hal pokok yang perlu diperbaiki adalah: menata ulang susunan pemda kita,

membenahi pembagian urusan pemerintahan, memperjelas pembentukan daerah otonom, menguatkan fiskal daerah, membenahi manajemen kepegawaian pemda, mengefisienkan pembentukan produk hukum daerah, dan menyempurnakan sistem pengawasan. Semoga otonomi daerah kita bisa lebih maju lagi ke depan. (Tulisan ini pernah dimuat di Kompas.com)



amanah mengelola pemda, dan berperilaku koruptif pula. Dalam tempo 20 tahun ini, sudah lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kena kasus hukum. Mereka cenderung pragmatis, jalan-jalan saja apa adanya. Miskin inovasi dan tak ada kreasi.

Birokrasi di daerah juga dipaksa untuk tidak netral dalam pilkada, dan diintervensi dalam menjalankan



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengucapkan

Hari Buruh



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

